

**PENGARUH DEMOKRASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN  
PENDAPATAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**REZI PUSPITA CHANIAGO**

**NPM 2051021002**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PENGARUH DEMOKRASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN  
PENDAPATAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP DERAJAT  
DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

**Oleh**

**REZI PUSPITA CHANIAGO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **PENGARUH DEMOKRASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

Oleh

**REZI PUSPITA CHANIAGO**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh demokrasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan jumlah penduduk terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama periode 2012-2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Random Effect* dan *robust standard error* yang diolah menggunakan *software* Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* tidak menunjukkan pengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan institusi demokratis, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pertimbangan aspek demografis memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah di Indonesia.

**Kata Kunci:** desentralisasi fiskal, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF DEMOCRACY, ECONOMIC GROWTH, INCOME  
INEQUALITY, AND POPULATION ON THE DEGREE OF FISCAL  
DECENTRALIZATION IN INDONESIA**

**By**

**REZI PUSPITA CHANIAGO**

*This study aims to analyze the effects of democracy, economic growth, income inequality, and population on the degree of fiscal decentralization in Indonesia. The research utilizes panel data from 32 provinces in Indonesia during the 2012-2023 period. The analytical method employed is panel data regression with Random Effect model and robust standard error, processed using Stata software. The results show that democracy, economic growth, and population variables have positive and significant effects on the degree of fiscal decentralization. Meanwhile, income inequality measured by the gini ratio shows no effect on the degree of fiscal decentralization. These findings imply that strengthening democratic institutions, promoting economic growth, and considering demographic aspects play crucial roles in enhancing regional fiscal autonomy in Indonesia.*

***Keywords: fiscal decentralization, democracy, economic growth, income inequality, population***

Judul Skripsi

**Pengaruh Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi,  
Ketimpangan Pendapatan, dan Jumlah Penduduk  
Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia**

Nama Mahasiswa

**Rezi Puspita Chaniago**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2051021002**

Program Studi

**Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

**Ekonomi dan Bisnis**



Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II

**Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**

**NIP 19600621 198603 1 002**

**Prayudha Ananta, S.E., M.Si.**

**NIP 19880916 201404 1 001**

**MENGETAHUI**

**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

**Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.**

**NIP 19800705 200604 2 002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Dr. Arivina Ratih Y. T., S.E., M.M.**

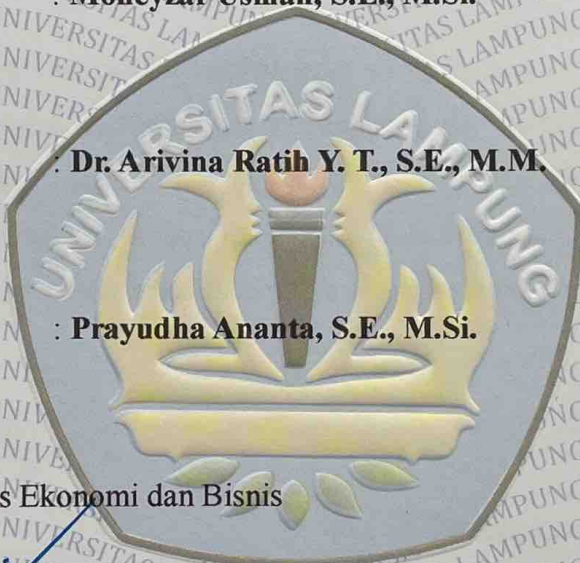
Penguji II : **Prayudha Ananta, S.E., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **02 Januari 2025**



*(Handwritten signatures of the examiners and dean)*

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezi Puspita Chaniago

NPM : 2051021002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Rezi Puspita Chaniago

## RIWAYAT HIDUP



Rezi Puspita Chaniago dilahirkan pada tanggal 11 Februari 2002 di Kota Jakarta Pusat, kemudian dibesarkan di Kota Tangerang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Puat Anas dan Ibu Lydia Kunangsari.

Penulis memulai pendidikannya di TK As-Sholihin di Kota Tangerang pada tahun 2007 dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Karawaci Baru 3 Kota Tangerang pada tahun 2014, pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Kota Tangerang pada tahun 2017, dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 8 Kota Tangerang pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SMMPTN Barat. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Pekon Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat.



## MOTTO

وَسِعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS Al-Insyirah: 5-8)

*“If you can't change your appearance, change your perspective. Sculpturing your own process is must have pain and conviction. But in this process, the process will help us be a better self.”*

(Huang Renjun)

*“The process of wanting to persue something is actually more precious than becoming that thing. Just being in the process itself is a price and you shouldn't think it as a hard way. Even if you get stressed out, just think about it as a happy stress.”*

(Mark Lee)

*“Opportunities favor the bold who dare to begin, not those who wait to be ready.”*

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah. shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mulia.*

*Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tuaku Tersayang*

***Puat Anas***

***Lydia Kunangsari***

*Terima kasih atas doa-doa yang selalu mengiringi langkahku, dukungan yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tiada henti, baik secara moral maupun materi. Semua yang kalian lakukan menjadi sumber kekuatan dan semangatku hingga hari ini. Aku hanya bisa memohon kepada Tuhan agar Ayah dan Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda terima kasihku yang sederhana untuk kalian.*

*Serta*

***Almamater Tercinta***

***Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis***

***Universitas Lampung***

*Semoga karya kecil ini bermanfaat*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pengaruh Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Jumlah Penduduk terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia."** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat berarti dalam menyempurnakan penelitian ini.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang Ibu berikan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama. Terima kasih atas kesabaran, arahan, dan masukan yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas pada seminar proposal dan seminar hasil. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian saya.
7. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa studi.
9. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas pelayanan dan bantuan yang diberikan selama masa studi.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Puat Anas dan Ibu Lydia Kunangsari. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Kalian adalah motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Aik. Terima kasih atas doa, dukungan, dan perjuangan sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini.
12. Adikku tersayang, Regina Zhea Alyka. Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis.
13. Keluarga besar dari kedua pihak orang tua. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tulus. Kehadiran kalian menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kucingku, Onel. Terima kasih telah menjadi teman setia yang selalu menghibur di saat penulis merasa lelah.
15. *Publik Genk*: Nadiya Hasna Adyanka, Aqila Diva Fajrina, Ulfa Sekar Dini, dan Laura Dwipa Saskia. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan keceriaan yang kalian berikan selama masa kuliah. Kehadiran kalian telah menciptakan momen-momen yang tak terlupakan dan menjadikan perjalanan akademik ini lebih berwarna.

16. Salma Nailya dan Nandita Putri. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin sejak Sekolah Dasar hingga kini. Kehadiran kalian selalu memberikan dukungan dan semangat di berbagai kesempatan.
17. Muthia dan Regina. Terima kasih atas keceriaan, dukungan, dan kebersamaan selama masa SMA, yang tetap berlanjut hingga sekarang.
18. Teman-teman *Perencanaan Genk*: Adisa Regita Cahyani, Revina Sefira, Silva Triananda, Dhiya Laili Izdihar, dan Deswira Aulia. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan kenangan indah selama masa kuliah.
19. Teman-teman KKN Desa Labuhan Pulau Pisang. Terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama masa pengabdian selama kurang lebih 40 hari, yang menjadikan pengalaman ini begitu bermakna dan berkesan.
20. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusinya dalam proses penyusunan skripsi ini.
21. *Last but not least, I want to acknowledge myself for the dedication, perseverance, and hard work put into completing this thesis. Thank you for staying committed despite the challenges, believing in your abilities, and pushing through until the end. This achievement is a testament to your resilience and determination. Be proud of how far you've come and keep striving for excellence in all your future endeavors.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya

Bandar Lampung, 02 Januari 2025

Penulis

Rezi Puspita Chaniago

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Signifikansi Penelitian .....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Peran Pemerintah.....	17
2.1.2 Otonomi Daerah .....	18
2.1.3 Keuangan Daerah .....	19
2.1.4 Demokrasi .....	25
2.1.5 Teori <i>Good Governance</i> .....	30
2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	31
2.1.7 Ketimpangan Pendapatan.....	36
2.1.8 Teori Kurva U-Terbalik (Hipotesis Kuznets) .....	39
2.2 Tinjauan Empiris .....	40
2.3 Pengaruh Antara Variabel.....	47
2.4 Kerangka Pemikiran .....	50
2.5 Hipotesis .....	51
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	53
3.4 Metode Analisis Data.....	54
3.5 Prosedur Analisis Data.....	55
3.5.1 Data Panel Statis.....	55

3.5.2	Pengujian Hipotesis .....	56
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	59
4.2	Uji Asumsi Klasik.....	60
4.2.1	Uji Normalitas .....	60
4.2.2	Uji Multikolinieritas .....	61
4.2.3	Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi .....	61
4.3	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	62
4.3.1	Uji Lagrange Multiplier .....	62
4.3.2	Uji Hausman.....	62
4.4	Hasil Persamaan Regresi Data Panel Pada Model Terpilih REM .....	62
4.5	Uji Hipotesis Statistik .....	64
4.5.1	Uji T Statistik .....	64
4.5.2	Uji F Statistik .....	65
4.5.3	Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	66
4.6	Pembahasan Penelitian .....	66
4.6.1	Pengaruh Demokrasi Terhadap DDF di Indonesia .....	68
4.6.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap DDF di Indonesia .....	72
4.6.3	Pengaruh <i>Gini Ratio</i> Terhadap DDF di Indonesia.....	74
4.6.4	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap DDF di Indonesia .....	75
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
5.1	Simpulan .....	78
5.2	Saran .....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal.....	24
2. Penelitian Terdahulu.....	40
3. Deskripsi Data .....	52
4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	59
5. Hasil Estimasi Data Panel Model <i>Random Effect</i> .....	63
6. Uji T Statistik.....	64
7. Uji F Statistik.....	65
8. Rata-Rata DDF dan TKKD 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023.....	66



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Tahapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Otonomi Daerah di Indonesia ....	1
2. Rata-Rata DDF 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023 .....	4
3. Rata-Rata IDI 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023 .....	7
4. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023 .....	9
5. Rata-Rata Gini Ratio 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023 .....	11
6. Jumlah Penduduk 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2023 .....	13
7. Kurva Penduduk Optimum Dalam Teori Pertumbuhan Klasik .....	32
8. Kurva Lorenz .....	38
9. Kurva Kuznets .....	39
10. Kerangka Pemikiran .....	51
11. Diagram Alur Penelitian .....	55
12. Aspek IDI 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2023 .....	71

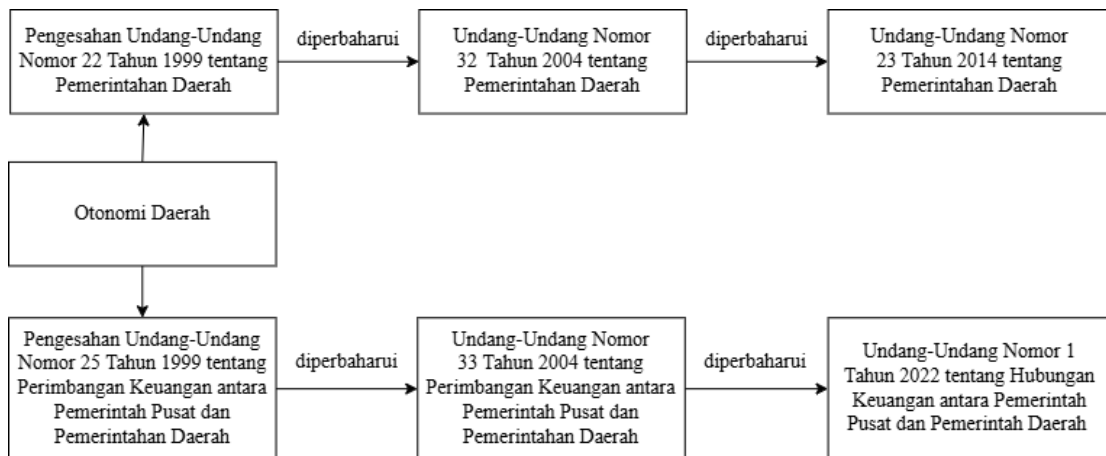
**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Data Variabel .....	87
2. Analisis Statistik Deskriptif.....	96
3. Hasil Uji Normalitas .....	96
4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	96
5. Hasil Uji Lagrange Multiplier .....	97
6. Hasil Uji Hausman.....	97
7. Hasil Regresi REM dengan <i>Robust Standard Error</i> .....	98

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik dan barang konsumsi (Ardianto & Usman, 2022). Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan publik dan penyediaan layanan yang lebih efektif kepada masyarakat, diperlukan sistem pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi dan merupakan sistem yang diterapkan dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah secara resmi dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001.



**Gambar 1. Tahapan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Otonomi Daerah di Indonesia**

Gambar 1 menggambarkan perubahan undang-undang yang mengelola otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Amandemen undang-undang ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan otonomi daerah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memegang kewenangan dan sumber daya yang memadai guna melaksanakan tugasnya secara efisien.

Pemerintah daerah mampu mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahan di wilayahnya berkat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dukungan terhadap pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan di setiap daerah, hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat (Hendratno, 2009). Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan sesuai dengan prinsip *money follows function*. Untuk membantu daerah dalam membiayai tugas-tugas tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana dan menyerahkan aliran pendapatan. Tujuannya adalah guna mengurangi disparitas keuangan antara daerah dan pemerintah pusat. Daerah juga didorong untuk memaksimalkan potensi pendapatan mereka sendiri guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer (Hastuti, 2018). Sumber pendanaan yang bersumber pada potensi lokal disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah dapat mencapai kemandirian keuangan dan memiliki kapasitas pembiayaan yang signifikan jika struktur PAD-nya kuat.

Serangkaian proses pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan mencakup pembangunan nasional dan daerah (Kustianingsih *et al.*, 2018). Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung integrasi ini dalam kerangka desentralisasi fiskal, guna memastikan keberhasilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang ada dengan maksimal. Menurut Halim (2004), ciri-ciri utama daerah yang berhasil menjalankan otonomi (desentralisasi fiskal) adalah (1) kapasitas keuangan daerah untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan memanfaatkan sumber daya keuangan sendiri yang memadai, dan (2) mengurangi ketergantungan pada dukungan pusat, memungkinkan PAD menjadi sumber pendanaan utama, dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah.

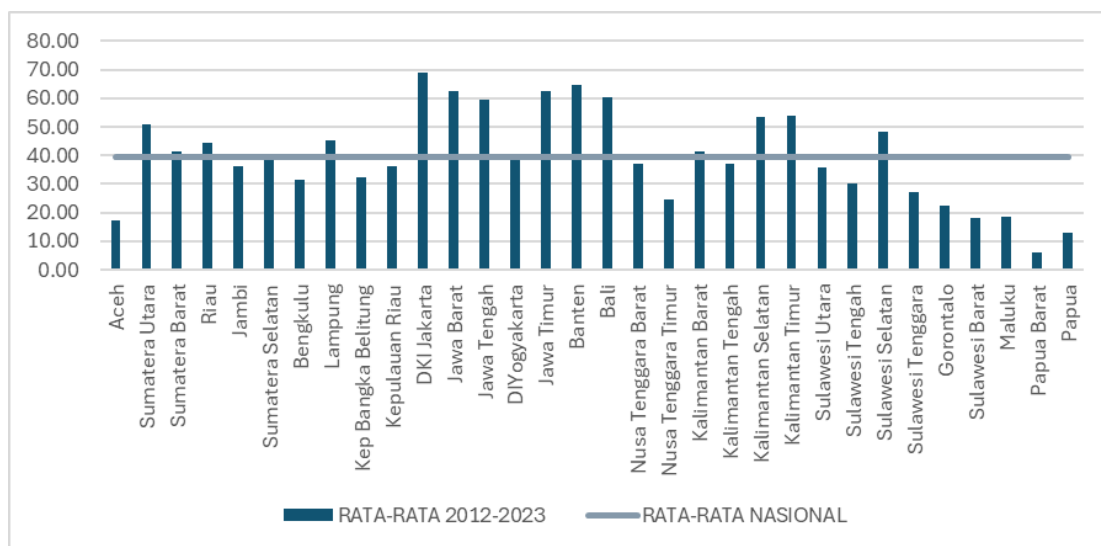
Musgrave (1969) membahas pembagian kekuasaan fiskal yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah. Musgrave menekankan bahwa guna mencapai efisiensi dalam distribusi sumber daya publik, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi, diperlukan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara pemerintah pusat lebih baik dalam menjalankan fungsi redistribusi dan stabilisasi untuk menjaga kesetaraan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, teorema desentralisasi dari Oates (1972) menyatakan bahwa tanpa adanya dampak lintas batas (*spillovers*), sistem desentralisasi lebih baik karena keputusan yang dibuat lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) memberikan informasi tentang apakah daerah dapat menjalankan otonomi secara efektif. Menurut Mahmudi (2019), perbandingan antara PAD dan total penerimaan daerah digunakan untuk menilai DDF. Partisipasi PAD yang lebih besar menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Tingkat keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah, seperti yang dijelaskan oleh DDF, mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah siap untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Sidik *et al.* (2002) desentralisasi fiskal di negara berkembang seperti Indonesia didorong oleh latar belakang negara, peran dalam globalisasi, ketertinggalan ekonomi, tuntutan perubahan layanan masyarakat, perpecahan negara, dan kegagalan pemerintah sentralistik dalam memberikan layanan publik yang efektif. Desentralisasi dianggap sebagai langkah strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah (Tiebout, 1956). Selain itu, pemerintah daerah dipandang lebih efisien dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya, karena kedekatannya dengan masyarakat memungkinkan mereka untuk lebih memahami serta mengantisipasi kebutuhan dan preferensi warga secara akurat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan keselarasan yang optimal antara preferensi masyarakat dengan penyediaan barang dan jasa. Secara

khusus, desentralisasi fiskal mengasumsikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat otonomi yang memadai dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, dengan minim atau bahkan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Obeng, 2021)

Meskipun pembentukan otonomi daerah membuka peluang lebih besar untuk memaksimalkan potensi masing-masing daerah, beberapa daerah belum siap menghadapi tantangan ini, yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Grafik DDF berikut mengilustrasikan hal tersebut.



Sumber: *DJPK Kementerian Keuangan 2024, diolah*

### **Gambar 2. Rata-Rata DDF 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023**

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan rata-rata DDF tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 69,16% yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, DDF di Provinsi Papua Barat merupakan yang terendah di Indonesia, dengan rata-rata hanya 6,03%. Mengingat PAD yang dicapai belum mencapai potensi penuh, hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Papua Barat masih belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah daerah masih mengandalkan pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk pendanaan reguler karena strategi

desentralisasi fiskal yang tidak efektif, terutama dalam hal penetapan pendapatan. Perbedaan signifikan dalam DDF antara Papua Barat dan DKI Jakarta mencerminkan variasi kapasitas fiskal daerah, di mana beberapa daerah menunjukkan kemampuan yang lebih maju sementara yang lainnya masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat, serta mencerminkan kesenjangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Terdapat beberapa provinsi lain di Indonesia yang rata-rata derajat desentralisasi fiskalnya berada di bawah rata-rata nasional sebesar 39,43%, selain Papua Barat. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh dengan rata-rata 17,11%, Jambi dengan rata-rata 36,11%, Bengkulu dengan rata-rata 31,30%, Kep. Bangka Belitung dengan rata-rata 32,22%, Kep. Riau dengan rata-rata 36,10%, NTB 37,09%, NTT dengan rata-rata 24,77%, Kalimantan Tengah dengan rata-rata 36,92%, Sulawesi Utara dengan rata-rata 35,67%, Sulawesi Tengah dengan rata-rata 30,30%, Sulawesi Tenggara dengan rata-rata 27,11%, Gorontalo dengan rata-rata 22,36%, Sulawesi Barat dengan rata-rata 18,01%, Maluku dengan rata-rata 18,63%, dan Papua dengan rata-rata 13,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi tersebut juga masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal. Selanjutnya, berdasarkan Gambar 2 terdapat perbedaan yang signifikan dalam DDF antara Pulau Jawa dan provinsi-provinsi lainnya yang disebutkan terdapat di luar Pulau Jawa. Rata-rata DDF di Pulau Jawa adalah sekitar 59,86%, sedangkan di luar Jawa rata-ratanya hanya sekitar 34,72%. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yang memiliki ekonomi lebih maju dan infrastruktur yang lebih baik, cenderung lebih mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan lebih efektif. Sebaliknya, provinsi di luar Jawa, meskipun memiliki potensi sumber daya yang besar, sering kali menghadapi kendala dalam hal kapasitas dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan desentralisasi fiskal secara optimal.

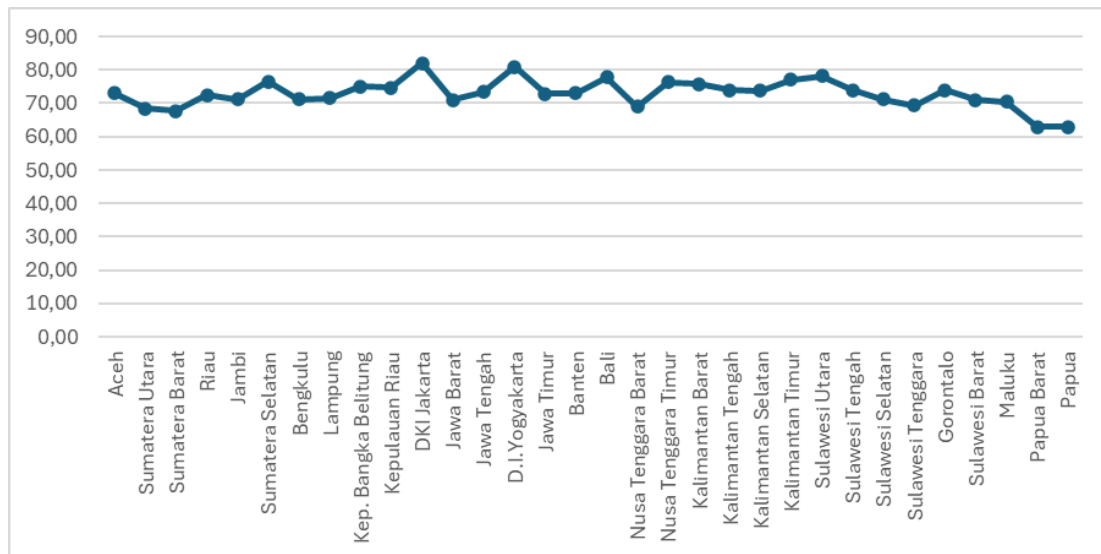
Desentralisasi fiskal telah menjadi fokus perhatian banyak negara berkembang dan maju dalam upaya guna mengoptimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat desentralisasi fiskal adalah kualitas demokrasi suatu negara. Di

Indonesia, penelitian yang mengkaji pengaruh demokrasi terhadap desentralisasi fiskal masih sangat terbatas, meskipun topik ini telah banyak diteliti di negara-negara lain. Sedangkan, pemahaman tentang bagaimana demokrasi mempengaruhi alokasi dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan yang lebih merata.

Penelitian oleh Bojanic (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan struktur demokrasi yang lebih kuat cenderung memiliki DDF yang lebih tinggi. Demokrasi yang kuat memungkinkan adanya sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang mendorong pemerintah pusat untuk mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab fiskal kepada pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk kian responsif akan kebutuhan dan preferensi lokal. Dengan demikian, penguatan struktur demokrasi dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencapai desentralisasi fiskal yang lebih besar, pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat juga studi tambahan yang mengkaji hubungan antara demokrasi dan desentralisasi fiskal. Qiao *et al.* (2019) menemukan bahwa demokrasi memainkan peran penting dalam desentralisasi fiskal, di mana tingkat demokrasi dapat mempengaruhi sejauh mana kekuasaan fiskal dilimpahkan dalam suatu negara. Obeng (2021) menyatakan bahwa tingginya tingkat demokrasi dapat melemahkan dampak negatif dari desentralisasi fiskal. Dengan demikian, hubungan antara demokrasi dan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh tingkat demokrasi, tetapi juga oleh keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal (Saragih, 2003).





Sumber: *Badan Pusat Statistik 2024, diolah*

### Gambar 3. Rata-Rata IDI 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023

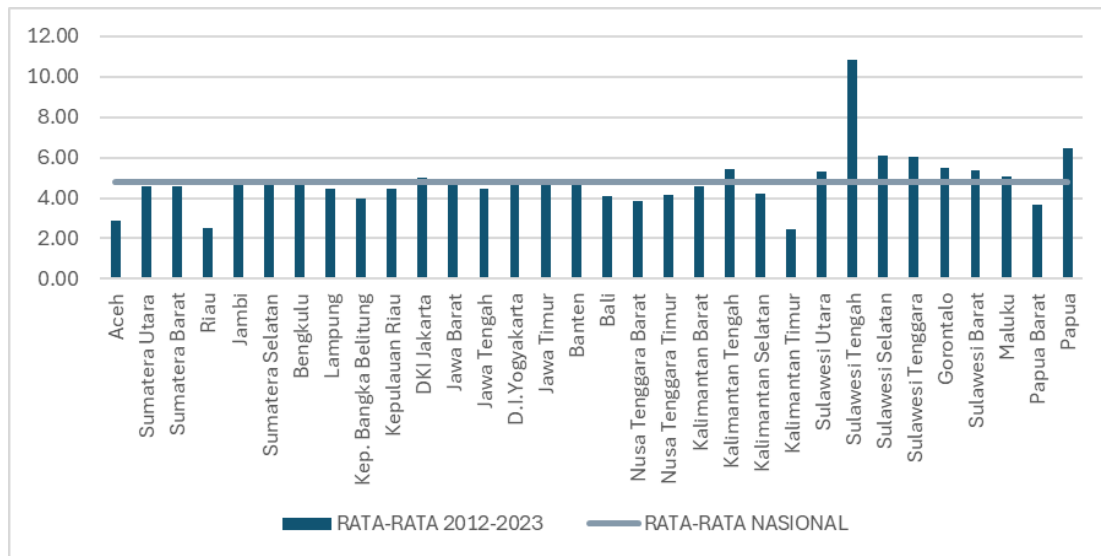
Berdasarkan Gambar 3 provinsi dengan rata-rata IDI tertinggi dari tahun 2012 hingga 2023 adalah DKI Jakarta dengan rata-rata nilai 81,95. DKI Jakarta secara konsisten menunjukkan tingkat demokrasi yang tinggi, yang mencerminkan kualitas tata kelola yang baik, kebebasan sipil yang kuat, serta partisipasi politik yang tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata IDI terendah adalah Papua Barat dengan rata-rata nilai 62,85. Provinsi Papua Barat menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tingkat demokrasi yang lebih tinggi. Perbedaan yang signifikan antara provinsi dengan IDI tertinggi dan terendah menunjukkan adanya variasi dalam implementasi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Provinsi dengan indeks tinggi seperti DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal kebijakan dan praktik demokrasi yang efektif. Sementara itu, provinsi dengan indeks rendah memerlukan perhatian dan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui reformasi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi-institusi demokratis.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sering digunakan sebagai ukuran seberapa baik kinerjanya lembaga, pemerintah, dan instansi terkait. Akibatnya, setiap negara akan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan (Himannudin *et al.*, 2023). Pertumbuhan

ekonomi daerah merupakan faktor krusial dalam mendorong desentralisasi fiskal yang efektif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi kebijakan otonomi daerah tidak hanya memperhatikan sejauh mana masyarakat lokal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan alokasi keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah melalui dana perimbangan. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator ekonomi, mencerminkan kondisi makro ekonomi daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (Saragih, 2003).

Menurut Saragih (2003), jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka hal ini menandakan akan mendukung peningkatan PAD. Widjaja (2007) menyatakan hal serupa bahwa bahwa guna meningkatkan PAD adalah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin bertambahnya PAD yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar pula kapasitas daerah untuk menjalankan desentralisasi fiskal dengan efektif. Arzaghi & Henderson (2005) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, yang pada akhirnya meningkatkan DDF, di mana tanggung jawab keuangan dan pengelolaan layanan publik semakin banyak dialihkan ke tingkat daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dalam distribusi sumber daya serta peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2024, diolah*

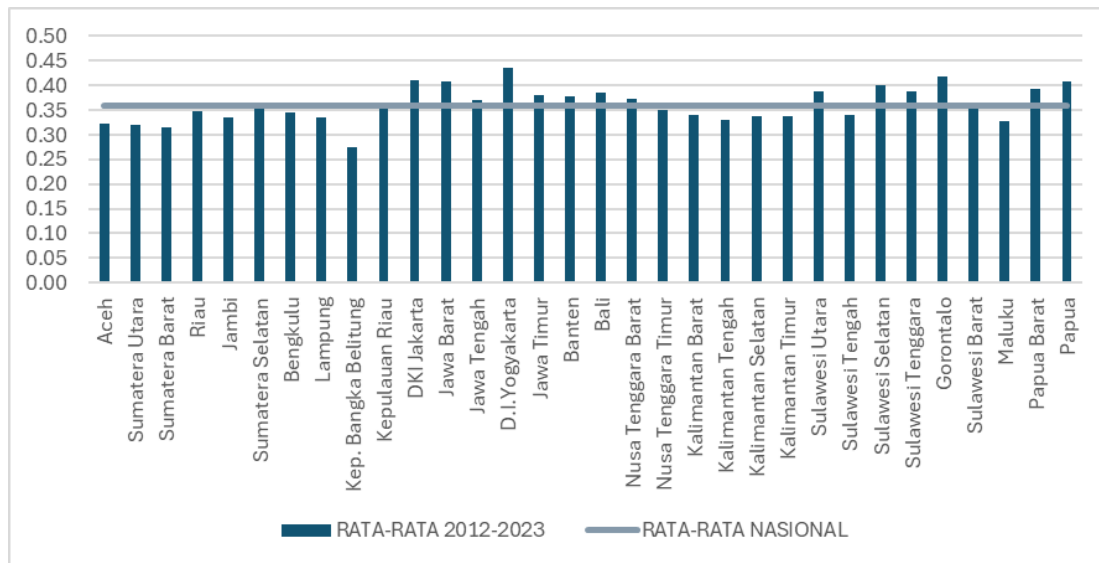
**Gambar 4. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023**

Dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,82%, Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Perkembangan ekonomi yang pesat di provinsi ini tercermin dari angka pertumbuhan yang kuat tersebut. Sebaliknya, Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan tahunan hanya 2,43%, mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang spesifik untuk mengatasi hambatan dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan serta merata. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang antarprovinsi dapat menghasilkan kesejahteraan nasional yang lebih tinggi dan lebih merata.

Terdapat beberapa provinsi lain di Indonesia yang rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,78%, selain Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh dengan rata-rata 2,87%, Sumatera Utara dengan rata-rata 4,57%, Sumatera Barat dengan rata-rata 4,60%, Riau dengan rata-rata 2,51%, Jambi dengan rata-rata 4,7%, Bengkulu dengan rata-rata 4,63%, Lampung dengan rata-rata 4,43%, Kep. Bangka Belitung dengan rata-rata 3,94%, Kep. Riau dengan rata-rata

4,47%, Jawa Barat dengan rata-rata 4,69%, Jawa Tengah dengan rata-rata 4,44%, Bali dengan rata-rata 4,08%. Di wilayah timur Indonesia, Nusa Tenggara Barat memiliki rata-rata 3,86%, Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata 4,14%, Kalimantan Barat dengan rata-rata sebesar 4,58%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan rata-rata 4,20%, dan Papua Barat dengan rata-rata 3,66%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah dengan pertumbuhan yang relatif rendah.

Lebih jauh, selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi DDF. Dalam konteks desentralisasi fiskal, ketimpangan pendapatan, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi desentralisasi fiskal di berbagai wilayah, dapat diukur melalui *gini ratio*. Studi yang dilakukan oleh Bojanic (2020) mendukung pendapat ini, yang membuktikan bahwa negara dengan distribusi pendapatan yang lebih adil cenderung memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih besar. Oleh karena itu, cara guna meningkatkan keadilan dalam distribusi pendapatan melalui kebijakan redistribusi dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat desentralisasi fiskal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan Delgado (2021) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan (diukur menggunakan *gini ratio*) memiliki pengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal, terutama pada negara dengan tingkat desentralisasi yang rendah, di mana ketimpangan yang lebih tinggi cenderung mengurangi desentralisasi fiskal



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2024, diolah*

**Gambar 5. Rata-Rata *Gini Ratio* 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2023**

Menurut Gambar 5, provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki *gini ratio* rata-rata terendah, yaitu 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Bangka Belitung memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dan tingkat kesenjangan yang relatif rendah. Sebaliknya, dengan rata-rata 0,43 antara tahun 2012 hingga 2023, D.I. Yogyakarta mencatatkan *gini ratio* tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Yogyakarta memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi.

Selain D.I. Yogyakarta yang memiliki rata-rata *gini ratio* tertinggi, masih terdapat beberapa provinsi lain yang juga memiliki rata-rata *gini ratio* di atas rata-rata nasional sebesar 0,36. Provinsi-provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta dengan rata-rata 0,41, Jawa Barat dengan rata-rata 0,41, Jawa Tengah dengan rata-rata 0,37, Jawa Timur dengan rata-rata 0,38, Banten dengan rata-rata 0,38, Bali dengan rata-rata 0,39, NTB dengan rata-rata 0,37, Sulawesi Utara dengan rata-rata 0,39, Sulawesi Selatan dengan rata-rata 0,40, Sulawesi Tenggara dengan rata-rata 0,39, Gorontalo dengan rata-rata 0,42, Papua Barat dengan rata-rata 0,39 dan Papua dengan rata-rata 0,41. Hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi tersebut masih

cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kesetaraan distribusi pendapatan.

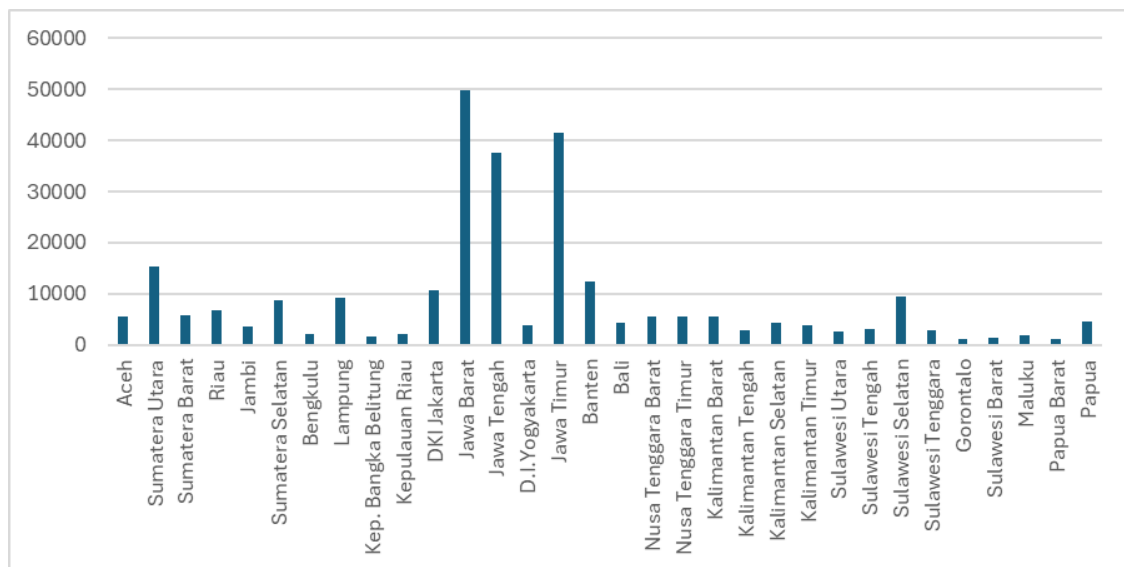
Jumlah penduduk juga merupakan faktor yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal. Jumlah penduduk bukan sekadar statistik, melainkan juga mencerminkan potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Kusuma (2020) mengemukakan bahwa penduduk, sebagai sumber daya manusia, memegang peranan kunci dalam pelaksanaan hasil perencanaan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka amat krusial di dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun, jumlah penduduk yang besar perlu diimbangi dengan kualitas yang layak, karena SDM yang berkualitas dapat berinovasi dan mengembangkan aspek-aspek produksi yang ada (Usman *et al.*, 2023). Berkaitan dengan itu, Todaro (2000) menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk bukan hambatan. Pada intinya, baik negara industri maupun negara berkembang dapat merasakan manfaat dari pengaruh penduduk yang berkembang terhadap pembangunan ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak spesialis, ide, dan bakat yang tersedia, serta semakin pesat kemajuan teknologi. Selain itu, penduduk juga memberikan manfaat jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk mendorong kemajuan ekonomi, karena permintaan terhadap barang konsumsi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, yang pada gilirannya akan mendorong produksi dalam skala besar dan mengurangi biaya produksi.

Halim (2001) menyatakan bahwa pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, seiring bertambah tingginya pendapatan individu, bertambah tinggi juga kemampuannya untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, dan sebaliknya. Pungutan-pungutan tersebut mencakup pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan bagian pada sumber PAD yang mendukung peningkatan DDF.

Penelitian oleh Cerniglia (2003) menunjukkan bahwa negara dengan penduduk besar cenderung lebih terdesentralisasi secara fiskal. Kebutuhan yang lebih besar untuk

menyediakan layanan publik yang beragam dan kompleks di wilayah berpenduduk tinggi mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Delgado (2021) menyatakan bahwa penduduk memiliki pengaruh terhadap desentralisasi fiskal yang cenderung positif. Lebih lanjut, Arzaghi & Henderson (2005) menunjukkan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap desentralisasi fiskal. Penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan penduduk mendorong terjadinya desentralisasi, di mana semakin besar penduduk suatu negara, semakin tinggi DDF. Pertumbuhan penduduk di suatu negara juga dapat meningkatkan permintaan untuk desentralisasi, karena daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi cenderung menginginkan otonomi lokal yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan publik mereka.



Sumber: *Badan Pusat Statistik 2024, diolah*

### Gambar 6. Jumlah Penduduk 32 Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 6 pada tahun 2023, Provinsi Papua Barat memiliki jumlah penduduk terendah di Indonesia, yaitu sebanyak 1.187 ribu jiwa. Sebaliknya, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia pada tahun yang sama, mencapai 49.860 ribu jiwa. Selanjutnya, Pulau Jawa mencatat jumlah penduduk terbesar dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini memperkuat

posisi Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan kepadatan penduduk nasional. Jumlah penduduk yang besar di Pulau Jawa memiliki dampak terhadap desentralisasi fiskal, karena daerah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali memiliki kebutuhan fiskal yang lebih besar dan memerlukan alokasi sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah di luar Jawa. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan jumlah penduduk yang melimpah sebagai potensi untuk mengembangkan daerahnya dengan memperhatikan kondisi demografis yang ada. Untuk meminimalkan ketergantungan dari pemerintah pusat, baik masyarakat maupun pemerintah daerah harus terus berupaya mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal untuk mencukupi kebutuhan pendanaan dan mendukung pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya (Kusuma, 2020).

Berdasarkan uraian sebelumnya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal menjadi sangat penting mengingat besarnya perbedaan kondisi ekonomi dan sosial antar daerah. Oleh karena itu, pada skripsi ini akan dianalisis pengaruh variabel demokrasi, pertumbuhan ekonomi, *gini ratio*, dan jumlah penduduk terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Derajat desentralisasi fiskal mencerminkan seberapa besar campur tangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah serta kesiapan pemerintah daerah saat melangsungkan otonomi daerah yang dapat dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah, yang menunjukkan bahwa DDF tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan perbedaan yang cukup besar antara daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa banyak daerah belum mandiri dalam pengelolaan keuangannya, karena PAD yang diperoleh belum optimal. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat desentralisasi fiskal adalah demokrasi. Namun, penelitian mengenai pengaruh antara demokrasi dan DDF di Indonesia masih sangat terbatas, sedangkan demokrasi memainkan peran penting di mana daerah dengan struktur demokrasi yang lebih kuat cenderung memiliki DDF yang lebih tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum merata di setiap daerah



menambah tantangan, karena pertumbuhan ekonomi yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan DDF. Ketimpangan pendapatan antar daerah, yang diukur dengan *gini ratio*, masih tinggi di beberapa daerah, yang dapat berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi desentralisasi fiskal. Lebih jauh lagi, perkembangan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menunjukkan potensi sumber daya manusia yang belum sepenuhnya dimanfaatkan di daerah lain, sedangkan sebaran penduduk yang lebih merata dapat mendukung pelaksanaan dan keberhasilan desentralisasi fiskal di seluruh Indonesia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah demokrasi berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia?
3. Apakah *gini ratio* berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh demokrasi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *gini ratio* terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini terletak pada pemanfaatan variabel demokrasi yang masih jarang digunakan dalam studi-studi desentralisasi fiskal di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi fiskal di Indonesia.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, sehingga distribusi sumber daya menjadi lebih merata dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

### 2. Bagi akademisi

Penelitian ini menambah literatur akademik mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, tata kelola keuangan daerah, serta pengaruh faktor-faktor ekonomi dan sosial terhadap kebijakan fiskal.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami pentingnya desentralisasi fiskal dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Dengan informasi ini, masyarakat dapat lebih berpartisipasi saat proses pengambilan keputusan dan mengawasi implementasi kebijakan publik, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

### 4. Bagi Penyusun

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan analisis data, pemahaman teori-teori ekonomi, serta pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah. Penelitian ini juga menjadi kontribusi penyusun dalam memberikan solusi atas permasalahan kebijakan fiskal di Indonesia, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Peran Pemerintah

Berdasarkan Mangkoesoebroto (2008) pemerintah memegang peranan yang besar pada perekonomian di sebuah negara terbukti melalui banyaknya kebijakan yang berkaitan oleh sektor publik. Adam Smith mengutarakan teorinya mengenai tiga fungsi pemerintah yakni:

- a. Fungsi pemerintah adalah melindungi dan menjaga keamanan dalam negeri.
- b. Fungsi pemerintah saat menyiapkan sistem hukum yang adil.
- c. Fungsi pemerintah saat menyediakan produk publik seperti jalan, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang tidak dapat dipasok oleh sektor swasta.

Dalam ekonomi modern, fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Peran alokasi: Pemerintah menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang publik dan swasta. Barang publik, seperti pertahanan, izin udara, dan infrastruktur jalan, disediakan oleh pemerintah karena tidak bisa dipasok oleh sektor swasta. Sebaliknya, barang pribadi dapat dipasok melalui transaksi pasar antara pembeli dan penjual.
- b. Peranan distribusi: Pemerintah berperan dalam mendistribusikan pendapatan melalui kebijakan fiskal, seperti sistem pajak progresif, yang memungkinkan orang kaya membayar pajak lebih tinggi, sementara orang miskin membayar lebih sedikit pajak. Pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat miskin, seperti

subsidi pupuk dan pinjaman perumahan murah, untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

- c. Peranan stabilisasi: Pemerintah menggunakan berbagai kebijakan untuk menstabilkan perekonomian, dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan tingkat peluang kerja yang tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **2.1.2 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa “Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8, 9, dan 11, terdapat tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu: “(1) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi; (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; (3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

Meningkatkan pelayanan publik dan menumbuhkan ekonomi lokal adalah sasaran utama pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tiga hal utama, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Widjaja (2011), suatu daerah otonomi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tersedia SDM yang kompeten.
2. Terdapat sumber pendanaan yang jelas untuk memperkuat layanan masyarakat, pembangunan, dan berbagai urusan pemerintah yang selaras oleh kepentingan dan karakteristik daerah.
3. Aksesibilitas terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah.
4. Koridor NKRI merupakan wilayah di mana otonomi daerah diterapkan.

### **2.1.3 Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai “semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.” Pada konteks ini, yang dimaksud dengan “daerah” ialah pemerintah daerah yang memiliki otonomi berlandaskan ketentuan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Mengingat pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, maka keuangan daerah menjadi aspek yang tidak terlepas dari struktur pemerintahan pusat.

Halim & Kusufi (2012) menyatakan bahwa ada dua poin penting yang harus dijelaskan dari definisi ini:

1. Istilah "segala hak" merujuk pada hak untuk menerima dana alokasi umum dan khusus yang dapat meningkatkan kekayaan daerah, serta pendapatan daerah yang didapat melalui pajak, retribusi, dan keuntungan bisnis lokal.
2. Istilah "semua kewajiban" merujuk pada komitmen keuangan untuk membayar biaya yang terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur, operasional pemerintah, dan pembangunan ekonomi, yang semuanya berpotensi mengurangi kekayaan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, lingkup keuangan daerah meliputi: “(1) Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; (3) Penerimaan daerah; (4) Pengeluaran daerah; (5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.”

Menurut Bastian (2006) sudut pandang sistem keuangan daerah ditujukan untuk menghasilkan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah, serta untuk mengalokasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang secara terbuka dan jelas. Sistem ini harus mempertimbangkan tujuan dan partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab daerah dalam mendanai tugas otonomi dan menjamin ketersediaan sumber daya keuangan yang berasal langsung dari daerah itu. Kemampuan daerah dalam mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, termasuk dalam hal administrasi anggaran dan keuangan daerah, tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan daerah semuanya termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 77

Tahun 2020. Dengan demikian, keuangan daerah digunakan dalam rangka memenuhi tugas dalam melaksanakan pemerintahan daerah, dengan fokus yang lebih pada pengelolaan kekayaan daerah.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dinyatakan oleh Mardiasmo (2002):

1. **Transparansi**

Keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD, di mana seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dan akses terhadap informasi tentang proses anggaran untuk kepentingan bersama.

2. **Akuntabilitas**

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik, DPRD dan masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan proses penganggaran, mulai dari perencanaan dan persiapan hingga pelaksanaan. Masyarakat berhak mengetahui dan menuntut pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola.

3. *Value of Money*

Mengimplementasikan konsep ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomi merujuk pada penggunaan sumber daya dengan biaya yang lebih rendah tetapi tetap menghasilkan jumlah dan kualitas tertentu. Efisiensi berarti memaksimalkan *output* dari dana masyarakat (*public money*). Sedangkan, efektifitas mengacu pada penggunaan dana guna meraih tujuan dan target yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Analisis rasio keuangan daerah termasuk salah satu metode yang diterapkan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Mahmudi (2019) menyebutkan sejumlah rasio, antara lain rasio DDF, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

### **2.1.3.1 Desentralisasi Fiskal**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada

daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi." Saragih (2003) mengemukakan bahwasanya desentralisasi fiskal adalah proses mengalokasikan dana dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelayanan dan operasional publik sejalan dengan kewenangan yang telah diberikan. Kemudian, menurut Sidik dalam Badrudin (2012), desentralisasi fiskal berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih demokratis dengan mengalihkan penguasaan belanja, pemungutan pajak, pembentukan dewan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan bantuan pemerintah pusat.

Rondinelli dalam Khusaini (2006) menyatakan bahwa ada empat kategori desentralisasi:

1. *Deconsentration*: Pengalihan kekuasaan ke perwakilan yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan pusat.
2. *Delegation*: Memberikan kewenangan untuk tugas-tugas tertentu kepada lembaga di luar struktur birokrasi reguler yang diatur secara tidak langsung oleh pemerintah pusat dan pada umumnya diatur pada peraturan hukum.
3. *Devolution*: Pelimpahan wewenang otonom kepada pemerintah daerah atas masalah keuangan atau fungsi pemerintahan lainnya yang tidak berada di bawah pengaruh langsung pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan dan mengatur pemanfaatannya. Jika pemerintah daerah tidak sanggup sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah pusat hendak menyerahkan pengawasan tidak langsung.
4. *Privatization*: Memberikan sektor swasta dan kelompok non-pemerintah lebih banyak kekuasaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, mengurangi birokrasi, dan memungkinkan organisasi non-pemerintah untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

Berdasarkan Mardiasmo (2009), tujuan dan prinsip desentralisasi fiskal terdiri dari:

1. Mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*) dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kesetaraan dan kualitas pelayanan publik di daerah.



3. Membuat pemanfaatan sumber daya nasional lebih efektif.
4. Menerapkan tata kelola yang akuntabel dan transparan untuk distribusi dana transfer ke daerah.
5. Mendorong kebijakan makroekonomi yang mendorong keberlanjutan fiskal.

Simanjuntak dalam Yani (2008) menyatakan bahwa tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah:

1. Menyanggupi tuntutan daerah terkait penguasaan sumber-sumber keuangan.
2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
3. Mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan daerah.
4. Menurunkan kesenjangan regional.
5. Memastikan ketersediaan layanan publik minimal pada tiap daerah.
6. Mengoptimalkan kesejahteraan umum masyarakat.

Menurut Khusaini (2006) desentralisasi dalam otonomi daerah memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Aspek ekonomi: Pemimpin lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi daerahnya, sehingga inisiatif pembangunan ekonomi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal.
2. Aspek administratif: Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi dengan lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan sistem administrasi daerah dan menghasilkan layanan yang lebih efektif.
3. Aspek politik: Desentralisasi berperan dalam memperkuat persatuan di negara yang heterogen, mendidik masyarakat tentang proses pengambilan keputusan, dan mendorong partisipasi langsung, sehingga memajukan demokrasi.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat diterapkan guna memperkirakan tingkat desentralisasi fiskal di daerah. DDF dihitung dengan membandingkan antara PAD dan total pendapatan daerah. Berikut adalah rumusan DDF menurut Mahmudi (2019):

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi PAD yang lebih besar menunjukkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Mahmudi, 2019). Lebih lanjut, Menurut Tim KKD FE-UGM dalam Munir (2004), tolak ukur untuk menilai derajat desentralisasi fiskal suatu daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal**

<b>Derajat Desentralisasi Fiskal (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim KKD FE-UGM

### 2.1.3.2 Teori Federalisme Fiskal

Musgrave (1959) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memengaruhi perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan melalui pembagian kewenangan pengelolaan keuangan antar tingkat pemerintahan. Oates (1972) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dua perspektif yang menjelaskan dampak ekonomi dari implementasi desentralisasi dimiliki oleh teori federalisme fiskal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Traditional Theories (First-Generation Theories)*

Pada teori generasi pertama memiliki dua pendapat yang menitikberatkan keuntungan alokatif desentralisasi.

##### a. Pengetahuan masyarakat (*knowledge in society*)

Hayek (1945) dalam Khusaini (2006) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal lebih efisien sebab pemerintah daerah menyimpan informasi yang lebih akurat perihal kebutuhan lokal, memungkinkan alokasi barang dan jasa yang lebih tepat dibandingkan pemerintah pusat.

- b. Dimensi persaingan antar pemerintah daerah dari sisi alokasi belanja publik. Tiebout (1956) dalam Khusaini (2006), persaingan antar pemerintah daerah dalam alokasi belanja publik memungkinkan masyarakat menentukan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mendorong pemerintah daerah untuk menjamin layanan yang lebih tepat melalui pendanaan mandiri (*self-financing*).

## 2. *New Perspective Theories (Second Generation Theories)*

Musgrave (1969) memfokuskan kepentingan pembagian kewenangan mengelola penerimaan dan pengeluaran (*revenue dan expenditure assignment*) antar tingkat pemerintahan. Desentralisasi fiskal mempengaruhi perilaku pemerintah daerah dengan memberi mereka lebih banyak kewenangan dalam mengelola perekonomian lokal, serta menekankan pentingnya interaksi vertikal dan horizontal antar pemerintah untuk menyelaraskan kepentingan lokal dengan kemakmuran ekonomi.

### 2.1.4 Demokrasi

Sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak dan kekuasaan rakyat disebut sebagai demokrasi (Irawan, 2007). Dalam demokrasi, pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat sebab kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebagian besar negara di dunia memilih demokrasi yang berasal dari desakan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Dahl (1971), sebagaimana dikutip dalam laporan IDI 2009 (UNDP Indonesia, 2011), menyebutkan beberapa karakteristik sistem pemerintahan demokratis antara lain:

1. Kebebasan warga negara untuk membuat dan bergabung dengan organisasi.
2. Kebebasan untuk menyuarakan pemikiran atau pendapat seseorang.
3. Kesempatan untuk memegang jabatan publik.

4. Persaingan di antara penduduk untuk mengumpulkan dukungan untuk pemilihan jabatan publik.
5. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara pemilihan umum.
6. Pemilu yang adil dan jujur.
7. Kemampuan memperoleh informasi dari sumber selain pemerintah.
8. Kelembagaan yang menjamin bahwa opini dan keinginan publik berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah, dengan pemilihan rutin untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban kebijakan pemerintah.

Menurut Djiwandono (2003), sebuah sistem demokratis harus memenuhi tiga prinsip demokrasi:

1. Kebebasan individu dan kelompok tanpa pemaksaan.
2. Kebebasan individu harus diatur agar tidak saling mengganggu dan mencegah anarki.
3. Keterlibatan masyarakat pada keputusan yang diambil pemerintah, yang merupakan inti dari demokrasi.

Lebih lanjut, elemen-elemen mendasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam demokrasi dipaparkan oleh Djiwandono (2003):

1. Kesetaraan setiap orang diakui oleh demokrasi, di mana tidak ada perbedaan kedudukan antara warga negara.
2. Nilai-nilai individu memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan demokrasi dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini masyarakat.
3. Dalam sistem demokrasi, pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa yang sesungguhnya, karena kedaulatan dan kekuasaan sejati dimiliki oleh rakyat.
4. Adanya sikap toleransi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, yang mencerminkan sikap saling melindungi, saling menghargai, dan mengayomi.

5. Pengambilan keputusan dalam demokrasi dilakukan melalui musyawarah, bukan hanya ditentukan oleh kelompok mayoritas, untuk menghindari terjadinya tirani mayoritas.
6. Keberadaan aturan hukum yang berlaku untuk semua pihak merupakan dasar penting dalam demokrasi, karena tanpa aturan hukum, demokrasi dapat berubah menjadi anarki.
7. Demokrasi memiliki cara atau mekanisme untuk mencapai tujuan bersama yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, di mana praktik demokrasi yang baik harus dilaksanakan dengan cara yang benar pula.

Sementara itu, Dye & Zeilgler (1996) menyebutkan empat ide dasar demokrasi:

1. Keikutsertaan rakyat dalam pilihan yang memengaruhi kehidupan individu masyarakat.
2. Pemerintahan mayoritas yang mengakui hak-hak minoritas, termasuk kebebasan informasi, berkumpul, berserikat, berbicara, pembentukan partai oposisi, dan jabatan publik.
3. Dedikasi untuk menegakkan nilai-nilai hidup seperti kebebasan dan kepemilikan serta menghormati martabat yang melekat pada setiap orang.
4. Dedikasi untuk memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik, bertujuan untuk mengukur tingkat demokrasi secara kuantitatif. IDI juga mengilustrasikan tentang perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia. Pengukuran IDI tidak terbatas pada kinerja pemerintah atau birokrasi saja, melainkan juga mencakup peran partai politik, lembaga legislatif (DPRD), masyarakat, serta lembaga peradilan dan penegak hukum. Dengan demikian, tanggung jawab atas perkembangan IDI bukan hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada semua pihak yang terlibat.

Tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dianalisis melalui IDI, yang menilai implementasi prinsip demokrasi di seluruh provinsi. Komponen utama IDI mencakup tiga dimensi fundamental (Badan Pusat Statistik, 2024):

1. Kebebasan (*Liberalization*)
  - a. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi dari pihak aparat negara.
  - b. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, dan berekspresi antar individu dalam masyarakat.
  - c. Jaminan kebebasan dalam menjalankan keyakinan atau kepercayaan.
  - d. Jaminan kebebasan dalam berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat, berkeyakinan, dan berekspresi pada setiap kebijakan yang diambil.
  - e. Jaminan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.
  - f. Pemenuhan hak-hak bagi pekerja di tempat kerja.
  - g. Kebebasan pers dalam menjalankan fungsi dan perannya.
2. Kestaraan (*Equalization*)
  - a. Kestaraan antara pria dan wanita pada beragam aspek kehidupan.
  - b. Pengambilan keputusan publik melalui lembaga legislatif dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat.
  - c. Menanggulangi praktik monopoli dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.
  - d. Penyediaan akses bagi masyarakat miskin terhadap perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan.
  - e. Kestaraan kesempatan kerja di berbagai wilayah.
  - f. Akses yang adil bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
  - g. Kestaraan dalam mendapatkan pelayanan dasar.
3. Kapasitas Lembaga Demokrasi
  - a. Kinerja yang efektif dari lembaga legislatif.
  - b. Kinerja yang objektif dan profesional dari lembaga yudikatif.
  - c. Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
  - d. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pemerintah.

- e. Komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
- f. Keterbukaan pemerintah pada menyediakan informasi terkait anggaran negara, seperti APBN atau APBD.
- g. Pelayanan publik yang optimal diberikan oleh kinerja birokrasi.
- h. Pendidikan politik yang diberikan kepada kader partai politik.

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah proses yang kompleks yang menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap awal, data kuantitatif dikumpulkan melalui analisis menyeluruh dari berbagai dokumen resmi, termasuk surat kabar, peraturan daerah, dan keputusan administratif, yang berkaitan dengan pengukuran demokrasi. Peneliti kemudian mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengungkap masalah yang mungkin terlewatkan selama proses coding awal dan memperluas hasil penelitian. FGD memungkinkan pemahaman mendalam tentang perspektif ahli dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, tim peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pakar di bidang tertentu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Keseluruhan proses pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi, selanjutnya diproses oleh BPS Republik Indonesia, dan terakhir diverifikasi oleh dewan ahli serta mitra kerja profesional untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasilnya (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dalam IDI, skala 0–100 menggambarkan tingkat demokrasi, dengan 0 sebagai nilai terendah dan 100 sebagai nilai tertinggi. Skala ini dibagi menjadi tiga kategori: "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks antara 60–80), dan "buruk" (indeks < 60). Nilai terendah terjadi jika semua indikator memperoleh skor terendah, sementara nilai tertinggi tercapai jika semua indikator mendapat skor tertinggi (Badan Pusat Statistik, 2021).

### 2.1.5 Teori *Good Governance*

Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009), *good governance* ialah pendekatan yang fokus pada pembangunan sektor publik yang dijalankan oleh pemerintah yang baik. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa *good governance* mencakup tata kelola negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna mencapai pembangunan masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang efektif. Agung (2005) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan *good governance* adalah guna merealisasikan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Tujuan implementasi *good governance* telah diungkapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2010) sebagai berikut:

1. Efektivitas penyelenggaraan negara didorong dengan asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran, dan kesetaraan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga non-struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yang didasari oleh nilai moral dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas penyelenggara negara guna melangsungkan fungsi dan kewenangannya dengan baik.
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab guna mendorong kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan HAM dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Mardiasmo (2018) mengemukakan beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan *good governance*, yaitu::

1. Partipasi (*Participation*)

Masyarakat dilibatkan langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan, berdasarkan kebebasan berbicara, berasosiasi, dan berpartisipasi dalam mendorong demokrasi.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dan melindungi hak asasi manusia.



3. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi diwujudkan dengan menyediakan akses mudah terhadap informasi yang relevan, sehingga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

4. *Daya Tanggap (Responsiveness)*

Lembaga publik harus responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* secara cepat dan tepat.

5. *Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)*

Pemerintah berupaya menjembatani berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

6. *Kesetaraan (Equity)*

Setiap individu mendapat kesempatan yang sama guna meraih kesejahteraan dan keadilan sosial.

7. *Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency)*

Sumber daya publik dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan hasil yang efektif dan proses yang efisien.

8. *Akuntabilitas (Accountability)*

Setiap keputusan dan aktivitas pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan pengawasan.

9. *Visi Strategis (Strategic Vision)*

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki pandangan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan manusia dan tujuan masa depan yang jelas.

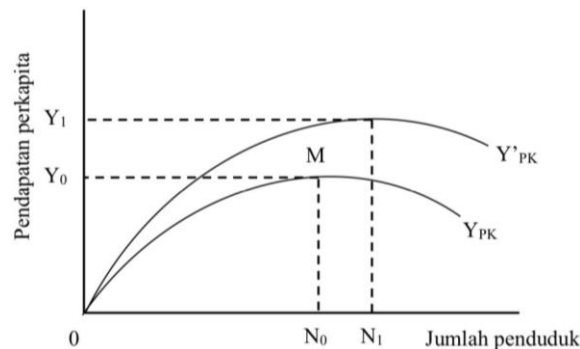
## **2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

### **2.1.6.1 Teori Pertumbuhan Klasik**

Dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, yaitu peningkatan total output dan pertumbuhan jumlah penduduk. Smith beranggapan bahwa kemampuan manusia sebagai faktor produksi dianggap menentukan kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi kualitas SDM, semakin besar dampaknya

terhadap kemakmuran. Tiga faktor utama yang mempengaruhi proses produksi atau pertumbuhan ekonomi adalah SDA, SDM, dan barang modal.

Sementara itu, menurut David Ricardo, aspek penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah SDA (terutama tanah) dan tenaga kerja. Ricardo menekankan pentingnya tenaga kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan tingkat upah minimum. Produktivitas yang meningkat akibat perubahan teknologi dan fenomena *diminishing return* juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk terus bertambah hingga produksi marjinal setara dengan pendapatan per kapita maksimum, ini disebut sebagai jumlah penduduk optimum (Sukirno, 2012).



**Gambar 7. Kurva Penduduk Optimum Dalam Teori Pertumbuhan Klasik**

Saat jumlah penduduk sebanyak  $N_0$ , pendapatan perkapita paling tinggi hanya sebesar  $Y_0$ . Saat jumlah penduduk menjadi optimum ( $N_1$ ), pendapatan perkapita menjadi lebih tinggi, yaitu  $Y_1$ . Kenaikan jumlah penduduk optimum akan menyebabkan pendapatan perkapita meningkat, yang mengarah pada pergeseran dari kurva  $Y_{PK}$  menuju kurva  $Y'_{PK}$ .

#### 2.1.6.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia mengembangkan teori pertumbuhan neoklasik, yang kemudian dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Model ini merupakan modifikasi dari model pertumbuhan yang diperkenalkan oleh Harrod-Domar sebelumnya. Perubahan penting yang dilakukan oleh Solow adalah memperkenalkan kemungkinan substitusi antara

tenaga kerja dan modal (Todaro & Smith, 2011). Model Solow menjelaskan bagaimana pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi berpengaruh pada produksi barang dan jasa suatu negara (Mankiw, 2006). Fungsi produksi Cobb-Douglas digunakan dalam teori ini, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = F(Kt, At, Lt)$$

Di mana:

Y = Output

K = Jumlah kapital

A = Produktivitas teknologi

L = Tenaga Kerja

Persamaan ini menunjukkan bahwa output merupakan hasil dari input seperti modal, tenaga kerja, dan produktivitas teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan output barang dan jasa, yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), dapat dicapai dengan peningkatan tenaga kerja, modal fisik, dan produktivitas seiring berjalannya waktu (Leasiwal, 2022).

### **2.1.6.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan dalam aktivitas ekonomi yang secara berkesinambungan meningkatkan pendapatan nasional riil dari satu periode ke periode berikutnya. Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan persentase peningkatan pendapatan nasional riil pada suatu tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Boediono (2008) menggambarkan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan output dalam jangka panjang yang melibatkan tiga elemen utama: proses itu sendiri, output per kapita, dan dimensi jangka panjang. Boediono berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan berkaitan dengan peningkatan output per kapita, bukan hasil yang langsung. Teori ini juga memperhitungkan pertumbuhan PDB dan penduduk untuk menjelaskan perubahan jangka panjang dalam output per kapita, yang cenderung meningkat seiring waktu.

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. SDA dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam berkontribusi besar dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi, terutama di fase awal pertumbuhan. Negara yang menyimpan SDA yang bisa dimanfaatkan secara efisien dapat mengatasi berbagai hambatan ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhannya.

2. Jumlah dan Kualitas Penduduk serta Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh pada peningkatan tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong kenaikan produksi. Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga produktivitas dan output ekonomi pun meningkat. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memperluas pasar. Namun, bagi negara dengan ekonomi yang kurang berkembang dan jumlah penduduk yang berlebihan, peningkatan jumlah tenaga kerja tanpa peningkatan produksi justru dapat menurunkan pendapatan per kapita dan merugikan kesejahteraan ekonomi.

3. Investasi dalam Barang Modal dan Inovasi Teknologi

Perkembangan ekonomi global saat ini lebih maju dan lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertinggal. Investasi dalam barang modal dan kemajuan teknologi menjadi kunci dalam meraih kemajuan ekonomi yang signifikan. Tanpa adanya inovasi teknologi, penambahan barang modal saja tidak akan menghasilkan peningkatan yang optimal, karena produktivitas tetap rendah.

4. Struktur Sosial dan Sikap Masyarakat

Dalam konteks pembangunan negara berkembang, ahli ekonomi mengungkapkan bahwa struktur sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghalang besar bagi kemajuan. Perilaku dan pola pikir masyarakat mempengaruhi sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Apabila terdapat hambatan yang berasal dari faktor sosial dan sikap masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menghilangkannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

PDB atau indikator PDRB untuk daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi setiap tahun, Indikator-indikator tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{PDRB}_t$  : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun tertentu yang akan dihitung

$\text{PDRB}_{t-1}$  : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya

#### 2.1.6.4 Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) penduduk meliputi semua individu yang mendiami wilayah geografis Republik Indonesia dalam enam bulan atau lebih, serta mereka yang mendiami kurang dari enam bulan dengan maksud untuk bermukim. Penduduk memainkan peran krusial dalam perekonomian sebab memasok tenaga kerja, tenaga profesional, dan pengusaha yang dibutuhkan guna menjalankan aktivitas ekonomi. Melalui peran-peran ini, penduduk turut berkontribusi dalam inovasi teknologi serta pemanfaatan berbagai faktor produksi (Sukirno, 2017).

Mulyadi (2007) mengemukakan terdapat tiga hal pokok yang memengaruhi jumlah penduduk:

1. *Fertilitas* (kelahiran), ialah kapabilitas perempuan untuk melahirkan, yang menambah jumlah penduduk
2. *Mortalitas* (kematian), atau angka kematian, mempengaruhi perubahan jumlah penduduk dengan menunjukkan tingkat kematian di suatu negara.
3. *Migrasi*, yaitu perpindahan dari pedesaan ke perkotaan, dapat mengubah pandangan dan keterampilan seseorang, tetapi jika pertumbuhan penduduk kota melebihi laju industrialisasi dan ekonomi, hal ini dapat mengurangi kesempatan kerja.

### 2.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan nasional suatu negara yang tidak merata di antara rumah tangganya. Teori yang dikemukakan Jeffrey G. Williamson mengenai kesenjangan pendapatan regional mengkaji hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah, dengan menggunakan data dari negara-negara maju dan berkembang. Pada tahap awal pembangunan, ekonomi cenderung terkonsentrasi di beberapa wilayah, yang menyebabkan ketidakseimbangan regional. Namun, seiring waktu, keseimbangan antar wilayah membaik, dan perbedaan antar wilayah tersebut mengalami penurunan yang signifikan (Kuncoro, 2004).

Williamson mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan disparitas pendapatan antar wilayah, yaitu SDA, migrasi tenaga kerja, aliran modal, dan kebijakan pemerintah. Kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi serta perbedaan pendapatan antar wilayah dianggap tak terhindarkan karena adanya variasi dalam potensi, kondisi, dan karakteristik masing-masing wilayah (Adisasmita, 2013).

Irma Adelman dan Cythia Taft Morris (1973) dalam Arsyad (2002) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang yakni:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, yang mengarah kepada penyusutan pendapatan per kapita.
2. Inflasi, yang menyebabkan peningkatan pendapatan uang tanpa ada kenaikan produksi barang.
3. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.
4. Investasi pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), yang menghasilkan lebih banyak pendapatan modal daripada pendapatan tenaga kerja, mengakibatkan lebih banyak pengangguran dan lebih sedikit mobilitas sosial.
5. Tingkat mobilitas sosial yang rendah.
6. Kebijakan substitusi impor, yang menyebabkan peningkatan harga barang industri guna melindungi kepentingan kapitalis.

7. Deteriorasi nilai tukar mata uang negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.
8. Kehancuran industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

Todaro & Smith (2006) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan yang sangat besar dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, di antaranya:

1. Menyebabkan ketidakefisienan pada perekonomian
2. Mengganggu stabilitas sosial dan rasa kebersamaan antar masyarakat
3. Ketimpangan pendapatan sering kali dianggap sebagai hal yang tidak adil

Suatu indikator yang didasarkan pada kurva Lorenz untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah *gini ratio*. Kurva ini melakukan perbandingan antara distribusi variabel tertentu, seperti pendapatan, dan distribusi seragam, yang menunjukkan persentase kumulatif penduduk. Nilai *gini ratio* berada dalam rentang 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Perhitungannya didasarkan pada rasio antara area di bawah garis diagonal dan area yang dibatasi oleh kurva Lorenz, dibagi dengan luas setengah bidang tempat kurva tersebut berada. Oshima (1976) dalam Sugiyarto (2015) menjelaskan bahwa GR kurang dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,4 dan 0,5 menunjukkan ketimpangan sedang, dan lebih dari 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi. Rasio Gini dihitung menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Haughton & Khandker, 2009):

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k (f_i - f_{i-1})(y_i - y_{i-1})$$

Keterangan:

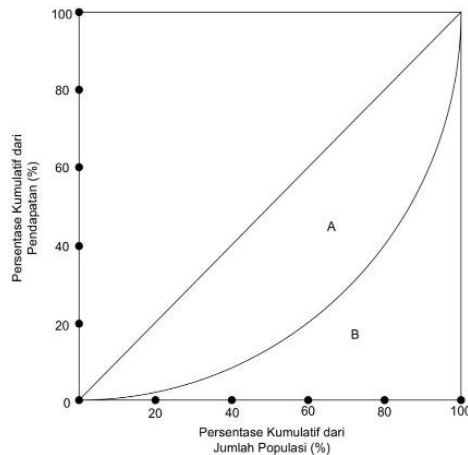
$k$  : banyaknya kelas/kelompok

$f_i$  : proporsi jumlah rumah tangga kumulatif kelas ke- $i$

$y_i$  : proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif kelas ke- $i$

Kurva Lorenz menggambarkan hubungan visual antara *gini ratio* dan distribusi pendapatan. Ketika luas area A semakin kecil, *gini ratio* juga semakin rendah, yang

menunjukkan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan kata lain, semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, semakin rendah *gini ratio*, yang menandakan distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Kurva Lorenz dapat dilihat pada Gambar 7.



**Gambar 8. Kurva Lorenz**

Kebijakan dan tindakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Kebijakan ini melibatkan upaya dari pemerintah pusat maupun daerah. Ada sejumlah kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol ketimpangan, antara lain (Sjafrizal, 2008):

1. Penyebaran pembangunan prasarana perhubungan

Membangun sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan, terminal, dan pelabuhan guna meningkatkan mobilitas barang dan komponen produksi antara wilayah. Jaringan komunikasi dan fasilitas telekomunikasi juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi isolasi daerah. Jika pemerintah melakukannya, ketimpangan akan berkurang karena usaha perdagangan dan mobilitas komponen produksi, yang akan mendorong investasi.

2. Mendorong transmigrasi dan migrasi spontan

Mengatasi kekurangan tenaga kerja di daerah terbelakang melalui transmigrasi dan migrasi spontan, sehingga mempercepat pembangunan daerah.

3. Pengembangan pusat pertumbuhan



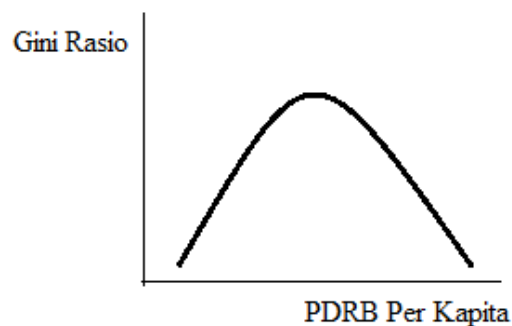
Konsep pusat pertumbuhan membantu pembangunan daerah dan mengurangi perbedaan pembangunan antar wilayah. Ini dapat dicapai dengan membangun pusat pertumbuhan di kota-kota skala kecil dan menengah, yang akan memungkinkan kegiatan pembangunan didistribusikan lebih merata di seluruh daerah.

#### 4. Pelaksanaan otonomi daerah

Dengan menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, pemerintah daerah dan masyarakat lokal diberi wewenang untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

### 2.1.8 Teori Kurva U-Terbalik (Hipotesis Kuznets)

Simon Kuznet (1955) dalam Todaro & Smith (2006) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan biasanya memburuk di awal pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring waktu, distribusi tersebut akan membaik. Fenomena ini disebut "Kurva Kuznet U-Terbalik," yang menggambarkan bagaimana distribusi pendapatan berubah seiring dengan perkembangan ekonomi. Kurva ini muncul sebagai akibat dari proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang didorong oleh ekspansi sektor modern. Dalam kurva tersebut, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan bersifat positif pada tahap awal, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini akan berbalik menjadi negatif, terutama disebabkan oleh pertumbuhan sektor modern yang berkelanjutan. Ilustrasi dari hipotesis Kuznets ini dapat dilihat pada Gambar 8.



**Gambar 9. Kurva Kuznets**

Hipotesis ini bermula dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kesenjangan pendapatan yang rendah. Penurunan terjadi setelah mencapai tingkat pertumbuhan

tertentu. Dua faktor utama yang berperan dalam mempengaruhi pola U, yaitu konsentrasi modal pada kelompok pendapatan tinggi dan pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuznets.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penulis telah mempelajari sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian ini. Daftar peneliti yang dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Antonio Nicolás Bojanic (2020)	<i>The Empirical Evidence on the Determinants of Fiscal Decentralization</i>  Variabel: 1. Desentralisasi Fiskal 2. Luas Wilayah 3. Pendapatan Per Kapita 4. Indeks Demokrasi 5. Keterbukaan Perdagangan 6. Populasi Urban 7. Indeks Gini 8. Indeks fragmentasi 9. Utang Pemerintah 10. Tingkat Inflasi 11. Tingkat Pengangguran 12. IPM	Data Panel <i>Generalized Least Squares</i> (GLS), Tobit model, dan <i>Two-stage</i> GLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran geografis suatu negara merupakan variabel yang paling konsisten dalam memengaruhi tingkat desentralisasi fiskal. Negara-negara dengan wilayah yang lebih luas, pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tingkat demokrasi yang lebih baik, tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, serta keterbukaan terhadap perdagangan internasional cenderung memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Selain itu, negara-negara dengan tingkat kesetaraan pendapatan yang lebih baik juga cenderung mendekati desentralisasi fiskal,

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				<p>meskipun terdapat variasi yang dipengaruhi oleh faktor regional dan tingkat pendapatan. Sementara itu, utang pemerintah secara umum menunjukkan pengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal, sedangkan tingkat fragmentasi politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variabel tambahan seperti indeks pembangunan manusia, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh yang bervariasi tergantung pada wilayah yang diteliti.</p>
2.	Francisco J. Delgado (2021)	<p><i>On the Determinants of Fiscal Decentralization: Evidence from the EU</i></p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desentralisasi Fiskal</li> <li>2. Populasi</li> <li>3. PDB Per Kapita</li> <li>4. Kepadatan</li> <li>5. Ketimpangan</li> <li>6. Korupsi</li> </ol>	Regresi Kuantil	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara populasi dengan desentralisasi fiskal, di mana peningkatan populasi cenderung diikuti oleh peningkatan desentralisasi fiskal. Sebaliknya, ditemukan dampak negatif pada GDP per kapita, kepadatan penduduk, dan ketimpangan pendapatan, dengan pengaruh yang lebih kuat pada negara-negara dengan tingkat</p>

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				desentralisasi fiskal yang tinggi. Hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi bersifat campuran, di mana pada negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang rendah, pengaruhnya cenderung negatif, sedangkan pada negara-negara dengan tingkat desentralisasi yang tinggi, pengaruhnya justru positif. Penelitian ini menyoroiti variasi derajat desentralisasi fiskal di negara-negara Uni Eropa dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda di berbagai bagian distribusi desentralisasi fiskal.
3.	Mohammad Arzaghi & J. Vernon Henderson (2005)	<i>Why Countries Are Fiscally Decentralizing</i>	Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat desentralisasi fiskal. Selain itu, variabel populasi nasional dan luas wilayah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap desentralisasi fiskal, meskipun tidak selalu signifikan. Sebaliknya, ukuran populasi di kota

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		6. Indeks Keragaman Etnolinguistik		metropolitan terbesar cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal. Indeks keragaman etnolinguistik menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat keragaman yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Di sisi lain, negara dengan tradisi hukum berbasis sistem hukum Perancis cenderung memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang menganut tradisi hukum berbasis sistem hukum Inggris.
		7. Tradisi Hukum		
4.	Floriana Cerniglia (2003)	<i>Decentralization in the Public Sector: Quantitative Aspects in Federal and Unitary Countries</i>  Variabel: 1. Desentralisasi Fiskal 2. Luas Wilayah 3. Populasi 4. Tingkat Urbanisasi 5. Pendapatan Per Kapita	Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah, jumlah populasi, dan pendapatan per kapita memiliki hubungan negatif dengan tingkat sentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar luas wilayah, populasi, dan pendapatan per kapita suatu negara, semakin rendah tingkat sentralisasi yang diterapkan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
6.		Ketimpangan Pendapatan		menunjukkan hubungan positif
7.		Indeks Homogenitas		dengan tingkat sentralisasi, di mana semakin tinggi
8.		Dummy Federal		ketimpangan pendapatan, semakin besar derajat sentralisasi yang terjadi. Selain itu, indeks homogenitas agama menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap desentralisasi, sedangkan indeks homogenitas bahasa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat sentralisasi maupun desentralisasi. Terakhir, negara dengan sistem federal cenderung memiliki tingkat sentralisasi yang lebih rendah dibandingkan negara dengan sistem kesatuan, mengindikasikan bahwa sistem federal lebih mendukung desentralisasi dibandingkan sistem negara kesatuan.
5.	Samuel Kwabena Obeng (2021)	<i>Fiscal decentralization, democracy and government size: Disentangling the complexities</i>	Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ukuran pemerintah, di mana

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Variabel: 1. Ukuran Pemerintah 2. Desentralisasi Fiskal 3. Varietas Demokrasi (Elektoral, Liberal, Partisipatoris, Deliberatif, dan Egalitarian)		peningkatan tingkat desentralisasi fiskal berhubungan dengan pengurangan ukuran pemerintah. Indeks demokrasi, khususnya demokrasi partisipatif, menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap ukuran pemerintah, di mana peningkatan tingkat demokrasi partisipatif berhubungan dengan penurunan ukuran pemerintah. Selain itu, interaksi antara desentralisasi fiskal dan tingkat demokrasi menunjukkan bahwa efek negatif desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah cenderung melemah seiring dengan meningkatnya tingkat demokrasi, terutama dalam konteks demokrasi partisipatif.
6.	Mo Qiao, Siying Ding, dan Yongzheng Liu (2019)	<i>Fiscal Decentralization and Government Size: The Role of Democracy</i>	Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara keseluruhan memiliki hubungan negatif dengan ukuran pemerintah. Tingkat demokrasi yang lebih tinggi cenderung mengurangi dampak negatif desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah, menunjukkan bahwa
		Variabel: 1. Ukuran Pemerintah 2. Desentralisasi Fiskal 3. Demokrasi		

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				dalam konteks demokrasi, desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas lokal dan permintaan untuk layanan publik, yang berpotensi meningkatkan ukuran pemerintah.
7.	Amos Joan Ramon Lubis, Parmadi, Siti Aminah (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<i>Time Series</i> Regresi Linear Sederhana	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap derajat otonomi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah.
		Variabel: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Derajat Otonomi Fiskal 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		

Sumber: *Dikembangkan oleh Penulis, 2024*

Penelitian ini mengadopsi penelitian Bojanic (2020) memperlihatkan pengaruh positif antara demokrasi dengan derajat desentralisasi fiskal dan pengaruh negatif antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* dengan derajat desentralisasi fiskal. Pada penelitian Arzaghi & Henderson (2005) dan Lubis *et al.*, (2017) penulis mengambil variabel pertumbuhan ekonomi dengan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal. Kemudian, penelitian yang dilakukan Delgado (2021) dan Cerniglia (2003), penulis mengambil variabel populasi (jumlah penduduk) dengan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal.



Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ide-idenya dikumpulkan dan diperbarui dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memperbarui lokasi, waktu, dan variabel independen yang digunakan.

## **2.3 Pengaruh Antara Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Demokrasi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal**

Demokrasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Dalam sistem demokratis, keputusan dibuat berdasarkan partisipasi warga dan perwakilan politik yang memungkinkan aspirasi lokal lebih mudah diakomodasi. Demokrasi cenderung mendorong desentralisasi fiskal karena pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal dianggap lebih efektif dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan spesifik daerah.

Oates (1972) dalam "*Decentralization Theorem*" menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan barang publik agar sesuai dengan preferensi lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem demokratis, partisipasi warga dan akuntabilitas politik adalah faktor penting. Pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis bertanggung jawab langsung kepada konstituennya, yaitu masyarakat yang memilih mereka, yang mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan preferensi lokal, seperti yang ditegaskan oleh Oates. Demokrasi meningkatkan kemampuan pemerintah lokal untuk menyesuaikan barang publik dengan kebutuhan spesifik daerahnya, karena keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan dan keinginan masyarakat.

Bojanic (2020) dalam studinya menunjukkan bahwa negara-negara dengan struktur demokrasi yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi. Demokrasi memungkinkan transparansi dan partisipasi yang lebih besar, yang memperkuat desentralisasi dengan memberikan kekuasaan lebih besar bagi pemerintah daerah guna mengendalikan pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri.

### **2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal**

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya mendorong peningkatan PAD, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Dengan PAD yang lebih tinggi, daerah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membiayai pengeluaran publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memperkuat otonomi fiskal daerah, sehingga meningkatkan derajat desentralisasi fiskal (Saragih, 2003).

Berdasarkan penelitian Arzaghi & Henderson (2005), pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap desentralisasi fiskal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa ketika pendapatan per kapita meningkat, permintaan dari daerah-daerah untuk otonomi lokal juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan daerah untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan mengelola anggaran mereka sendiri, sehingga meningkatkan tingkat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan aktivitas ekonomi, pemerintah daerah cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik secara mandiri, yang mendorong proses desentralisasi fiskal. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Lubis *et al.* (2017), di mana pertumbuhan ekonomi dikatakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap derajat otonomi fiskal.

### **2.3.3 Pengaruh *Gini Ratio* Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal**

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah saat mengumpulkan dan mengatur pendapatan mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal.

Studi Bojanic (2020) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap desentralisasi fiskal. Penelitian ini membuktikan bahwa DDF yang lebih tinggi cenderung dimiliki oleh negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Ketika pendapatan lebih merata, pemerintah daerah mempunyai kapasitas yang lebih baik guna mengumpulkan dan mengelola pendapatan

mereka sendiri, sehingga memungkinkan desentralisasi fiskal yang lebih efektif. Sebaliknya, ketika ketimpangan pendapatan tinggi, daerah yang lebih miskin kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, yang bisa menghambat proses desentralisasi fiskal. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai desentralisasi fiskal yang efektif, penting untuk memperhatikan distribusi pendapatan di negara tersebut.

Delgado (2021) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap desentralisasi fiskal. Penelitian ini membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui *gini ratio*, cenderung memiliki hubungan negatif dengan derajat desentralisasi fiskal. Artinya, makin rendah derajat desentralisasi fiskal pada suatu negara, makin tinggi disparitas pendapatan yang dimilikinya. Namun, dampak ini lebih terasa di negara-negara dengan DDF yang rendah, sementara di negara dengan derajat desentralisasi yang tinggi, pengaruh ketimpangan pendapatan tidak signifikan. Hasil ini menyoroti bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menjadi penghambat dalam proses desentralisasi fiskal, terutama di negara-negara yang belum sepenuhnya mengembangkan sistem desentralisasi mereka.

#### **2.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal**

Halim (2001) menyatakan bahwa pendapatan daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemampuan mereka membayar pajak. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya dalam membayar pajak. Salah satu cara menaikkan PAD adalah memperluas objek pajak dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dana yang diperoleh dari kontribusi masyarakat ini kemudian dapat dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah.

Studi yang dilakukan Delgado (2021) membuktikan bahwa pengaruh penduduk terhadap desentralisasi fiskal cenderung positif di semua kuantil, meskipun dampaknya lebih lemah di negara-negara dengan derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah atau sangat tinggi. Kemudian, penelitian oleh Cerniglia (2003) menunjukkan bahwa

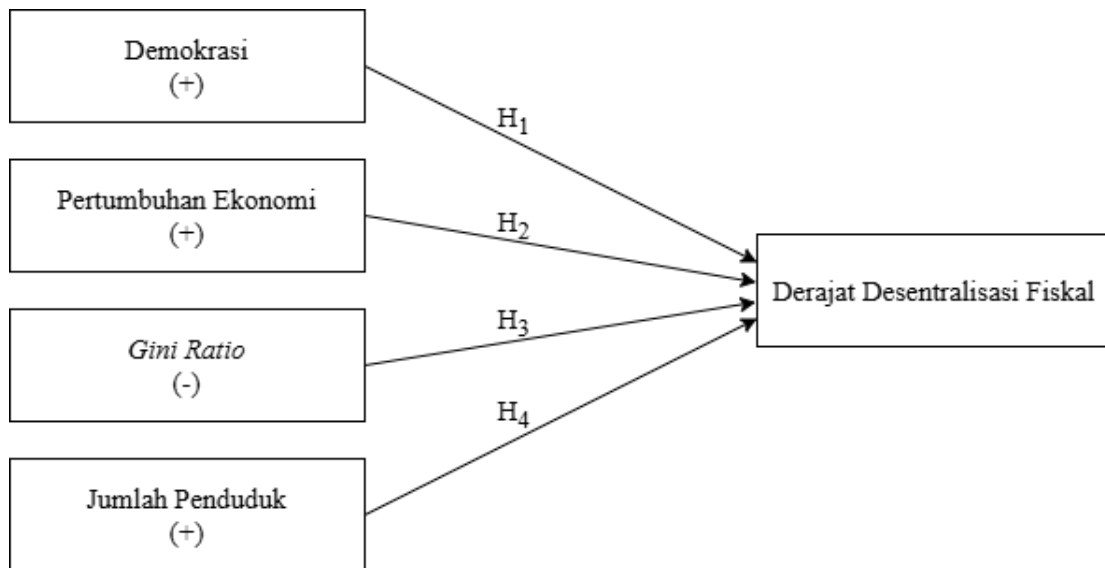
penduduk yang besar di suatu negara cenderung lebih terdesentralisasi secara fiskal. Ini disebabkan oleh kebutuhan yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik yang bervariasi dan kompleks di daerah dengan penduduk yang besar, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri dengan lebih mandiri.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Pada awal tahun 2001, Indonesia melakukan perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi, yang mengakibatkan transformasi besar dalam sistem keuangan negara. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh lebih banyak wewenang, yang mengurangi kontrol dan pengaruh pemerintah pusat. Kondisi keuangan daerah menjadi kunci utama bagi keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Untuk menurunkan ketergantungan dari pemerintah pusat, setiap daerah perlu memiliki kemampuan guna menghasilkan dan mengelola sumber daya keuangan secara mandiri.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran akan membahas pengaruh beberapa faktor terhadap derajat desentralisasi fiskal. Pertama, demokrasi dianggap berperan penting karena sistem politik yang lebih demokratis cenderung mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dapat memperkuat desentralisasi fiskal. Kedua, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor krusial, karena daerah dengan ekonomi yang lebih kuat memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar, sehingga mendukung implementasi desentralisasi yang lebih efektif. Ketiga, disparitas pendapatan, yang dinilai dengan *gini ratio*, dapat menghambat desentralisasi fiskal, karena ketidakmerataan pendapatan mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. Terakhir, jumlah penduduk, karena penduduk yang lebih besar seringkali membutuhkan layanan publik yang lebih beragam dan kompleks, yang dapat mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Kehadiran penduduk berdampak positif dalam mendorong kegiatan ekonomi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan PAD yang berperan dalam meningkatkan tingkat desentralisasi fiskal. Dengan mengkaji

hubungan antara faktor-faktor ini, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat desentralisasi fiskal.



**Gambar 10. Kerangka Pemikiran**

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga demokrasi berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal.
3. Diduga *gini ratio* berpengaruh negatif terhadap derajat desentralisasi fiskal.
4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga resmi untuk masyarakat. Data yang dipakai adalah data panel yang meliputi periode 2012 hingga 2023, dengan cakupan 32 provinsi di Indonesia. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

**Tabel 3. Deskripsi Data**

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber
Derajat Desentralisasi Fiskal	DDF	Persen	Diolah
Demokrasi	DE	Indeks	BPS
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen	BPS
<i>Gini Ratio</i>	GR	Indeks	BPS
Jumlah Penduduk	JP	Ribu Jiwa	BPS

#### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 32 Provinsi di Indonesia yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2012-2023 yang berfokus kepada variabel Derajat Desentralisasi Fiskal, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, *Gini Ratio*, dan Jumlah penduduk.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Derajat Desentralisasi Fiskal (Y)

DDF diukur dengan menghitung rasio antara PAD yang tercapai dengan total pendapatan daerah, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk periode 2012-2023 di 32 provinsi Indonesia. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2019). Rasio ini dinyatakan dalam persentase.

#### 2. Demokrasi (X<sub>1</sub>)

Demokrasi merujuk pada bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat (Syafiie, 2013). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Data IDI yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2012-2023 di 32 provinsi Indonesia, yang dinyatakan dalam bentuk indeks dan diperoleh dari BPS.

#### 3. Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>2</sub>)

Menurut Wahyudi & Astuti *et al.* (2022), tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur persentase perubahan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan pada penelitian ini mencakup periode 2012-2023 di 32 provinsi Indonesia, yang dinyatakan dalam persentase dan diperoleh dari BPS..

#### 4. Gini Ratio (X<sub>3</sub>)

*Gini ratio* adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah atau negara. Data *gini ratio* yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2012-2023 di 32 provinsi Indonesia, dinyatakan dalam persentase dan diperoleh dari BPS.

#### 5. Jumlah Penduduk (X<sub>4</sub>)

Jumlah penduduk merujuk pada total individu yang tinggal di suatu wilayah atau negara pada waktu tertentu (Said, 2012). Data jumlah penduduk yang digunakan

dalam penelitian ini mencakup periode 2012-2023 di 32 provinsi Indonesia, yang dinyatakan dalam ribuan jiwa dan diperoleh dari BPS.

### 3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai metode regresi linear berganda dengan data panel sebagai jenis data yang dianalisis. Untuk pengolahan data, penelitian ini memanfaatkan *software* Stata. Model regresi yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DDF_{it} = \beta_0 + \beta_1 DE_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 GR_{it} + \beta_4 LNJP_{it} + \varepsilon_{it}$$

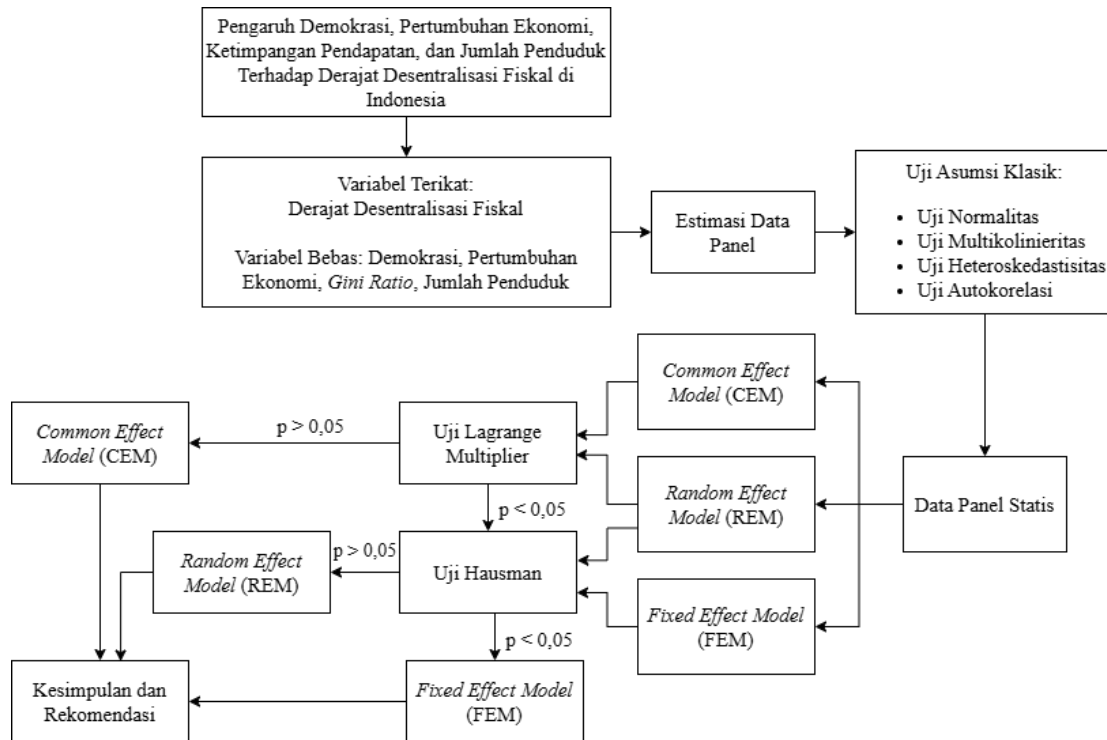
Keterangan:

$DDF_{it}$	: Derajat Desentralisasi Fiskal	(Persen)
$DE_{it}$	: Demokrasi	(Indeks)
$PE_{it}$	: Pertumbuhan Ekonomi	(Persen)
$GR_{it}$	: <i>Gini Ratio</i>	(Indeks)
$JP_{it}$	: Jumlah Penduduk	(Ribuan Jiwa)
LN	: Logaritma Natural	
i	: Jumlah data <i>cross section</i>	
t	: Jumlah data <i>time series</i>	
$\beta_0$	: Konstanta	
$\beta_1 - \beta_4$	: Koefisien Regresi	
$\varepsilon_i$	: <i>Error Term</i>	



### 3.5 Prosedur Analisis Data

#### 3.5.1 Data Panel Statis



**Gambar 11. Diagram Alur Penelitian**

Berdasarkan Gambar 11 alur analisis dimulai dengan mengidentifikasi variabel terikat, yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), serta variabel bebas yang mencakup Demokrasi (DE), Pertumbuhan Ekonomi (PE), *Gini Ratio* (GR), dan Jumlah Penduduk (JP). Analisis dilanjutkan dengan penerapan estimasi data panel, di mana dilakukan berbagai uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh akurat, tidak bias, dan konsisten.

#### 1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna memastikan apakah distribusi data dalam suatu kelompok atau variabel mengikuti pola distribusi normal atau tidak (Widarjono, 2018). Dalam uji normalitas, data dianggap terdistribusi normal jika nilai skewness berada di antara -2 hingga 2 dan kurtosis antara -7 hingga 7 (Ananta *et al.*, 2023).

## 2. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji ini adalah guna membuktikan apakah terdapat hubungan korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$H_0$  : Tidak terjadi multikolinieritas (*Variance Inflation Factor* (VIF) < 10)

$H_a$  : Terjadi multikolinieritas (*Variance Inflation Factor* (VIF) > 10)

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan guna mengamati apakah terdapat disparitas dalam residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Hipotesis untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$H_0$  : Tidak terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob >  $\alpha$  (0,05))

$H_a$  : Terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob <  $\alpha$  (0,05))

## 4. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan guna mendeteksi adanya korelasi antara nilai residual dalam model regresi. Jika ditemukan korelasi, maka masalah autokorelasi terjadi. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi, dengan hipotesis sebagai berikut (Santoso, 2019):

a. Nilai DW di bawah -2, artinya terdapat autokorelasi positif.

b. Nilai DW di antara -2 sampai +2, artinya tidak ada autokorelasi.

c. Nilai DW di atas +2, artinya ada autokorelasi negatif.

Kemudian, dalam analisis data panel terdapat tiga model utama yang digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji *Lagrange Multiplier* untuk memutuskan antara CEM dan REM, serta uji Hausman untuk memutuskan antara REM dan FEM. Model yang terpilih kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal di Indonesia.

### 3.5.2 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.2.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T statistik digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Pengujian ini membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) untuk menentukan apakah pengaruh variabel tersebut signifikan (Widarjono, 2018). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

a. Demokrasi (DE)

$H_{01} : \beta_1 = 0$ , DE tidak berpengaruh terhadap DDF

$H_{a1} : \beta_1 > 0$ , DE berpengaruh positif terhadap DDF

b. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

$H_{02} : \beta_2 = 0$ , PE tidak berpengaruh terhadap DDF

$H_{a2} : \beta_2 > 0$ , PE berpengaruh positif terhadap DDF

c. *Gini Ratio* (GR)

$H_{03} : \beta_3 = 0$ , GR tidak berpengaruh terhadap DDF

$H_{a3} : \beta_3 < 0$ , GR berpengaruh negatif terhadap DDF

d. Jumlah Penduduk (JP)

$H_{04} : \beta_4 = 0$ , JP tidak berpengaruh terhadap DDF

$H_{a4} : \beta_4 > 0$ , JP berpengaruh positif terhadap DDF

Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis ini adalah:

- a. Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### 3.5.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F statistik digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0$  :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a$  :  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya setidaknya satu variabel bebas berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis ini adalah:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya setidaknya terdapat satu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

### **3.5.2.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2018). Nilai  $R^2$  berada dalam rentang  $0 < R^2 < 1$ , yang dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $R^2$  mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil.
- b. Jika nilai  $R^2$  mendekati satu, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat besar.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil regresi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan penelitian ini adalah:

1. Kenaikan demokrasi dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal 32 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023.
2. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal 32 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023.
3. *Gini ratio* terbukti tidak dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal 32 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023.
4. Kenaikan jumlah penduduk dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal 32 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2023.

### 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong penguatan demokrasi, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat demokrasi yang rendah, melalui peningkatan kapasitas institusi daerah, pemberdayaan masyarakat setempat, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi melalui pendidikan politik perlu terus dilakukan. Mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat juga harus diperkuat untuk mendorong transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kegiatan diskusi publik serta pelatihan

kepemimpinan daerah dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan budaya demokrasi yang inklusif dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal secara lebih mandiri dan efisien.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), seperti kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, sebagai variabel yang memengaruhi derajat desentralisasi fiskal. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengaruh antara kualitas demokrasi dan efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di berbagai wilayah.
3. Pemerintah daerah harus terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor potensial di daerah masing-masing. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, serta kebijakan yang mendukung inovasi ekonomi di daerah perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan menarik lebih banyak investasi juga akan membantu meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya keuangan mereka tanpa bergantung pada transfer dari pusat.
4. Mengingat bahwa ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi derajat desentralisasi fiskal, tetapi ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Untuk mengurangi ketimpangan antarprovinsi, pemerintah pusat perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme redistribusi fiskal, terutama melalui DAU dan DAK. Distribusi dana yang lebih merata dan tepat sasaran dapat memastikan bahwa pembangunan di daerah tertinggal dapat tetap berlangsung dengan baik, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pendapatan antarprovinsi. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana ini diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan redistribusi fiskal.
5. Provinsi-provinsi dengan penduduk besar menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam menyediakan layanan publik yang bervariasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perpajakan

dan retribusi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas fiskal dan manajemen sumber daya harus dilakukan agar pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan masyarakat yang semakin heterogen dengan lebih baik dan tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah harus memperkuat perencanaan fiskal yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

6. Kapasitas kelembagaan di tingkat daerah perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang lebih efektif. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen fiskal, perencanaan anggaran, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi penting agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan fiskal secara mandiri dan efisien. Program pelatihan bagi pejabat daerah, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi untuk transparansi anggaran dapat berkontribusi pada pengelolaan fiskal yang lebih baik di tingkat lokal.
7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis dengan mempertimbangkan variabel ekonomi lainnya yang dapat memberikan perspektif baru terkait pengaruhnya terhadap derajat desentralisasi fiskal. Beberapa variabel yang layak dipertimbangkan antara lain inflasi, utang daerah, dan variabel ekonomi lainnya yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Graha Ilmu.
- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan.
- Ananta, P., Ezrien, M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence In Middle-Income Countries. *Building a Sustainable Future: Fostering Synergy Between Technology, Business, and Humanity*, 561–579.
- Ardianto, E. A., & Usman, M. (2022). Analisis Eksternalitas Positif Program “Wisata Alam 21” Desa Aji Mesir Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/efebe.v11.10>
- Arsyad, A. (2002). *Media Pembelajaran* (Edisi Pertama). PT. Raja Grafindo Persada.
- Arzaghi, M., & Henderson, J. V. (2005). Why countries are fiscally decentralizing. *Journal of Public Economics*, 89(7), 1157–1189. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.10.009>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kependudukan*. <https://lampung.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTk4IzI=/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk menurut Provinsi (Ribuan Jiwa)*. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTczIzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laju PDRB Menurut Provinsi (Persen)*.



<https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU2IzI=/laju-pdrb-menurut-provinsi.html>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Ringkasan Eksekutif Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara 2023*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UUP STIM YKPN.
- Bahl, R., & Linn, J. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. In *The Heart of Teaching Economics: Lessons from Leading Minds*. World Bank.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Boediono. (2008). *Ekonomi Moneter* (Edisi Ketiga). BPFE.
- Bojanic, A. N. (2020). The empirical evidence on the determinants of fiscal decentralization1. *Revista Finanzas y Politica Economica*, 12(1), 271–302. <https://doi.org/10.14718/REVFINANZPOLITECON.V12.N1.2020.2656>
- Cerniglia, F. (2003). Decentralization in the public sector: Quantitative aspects in federal and unitary countries. *Journal of Policy Modeling*, 25(8), 749–776. [https://doi.org/10.1016/S0161-8938\(03\)00069-3](https://doi.org/10.1016/S0161-8938(03)00069-3)
- Claus, I., Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2013). Coping with rising inequality in Asia: How effective are fiscal policies? *Asian Economic Papers*, 12(3), 1–33. [https://doi.org/10.1162/ASEP\\_a\\_00232](https://doi.org/10.1162/ASEP_a_00232)
- Delgado, F. J. (2021). On the Determinants of Fiscal Decentralization: Evidence From the EU. *Amfiteatru Economic*, 23(56), 174–174. <https://doi.org/10.24818/EA/2021/56/206>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2024). *Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Djiwandono, J. (2003). *Demos Kratos-Demokrasi: Panduan Bagi Pemula*. The Ridep Institute.
- Dye, T., & Zeigler, H. (1996). *The Irony of Democracy Uncommon Introduction to American Politic*. Wardsworth Publishing Company.
- Faguet, J. P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88(3–4), 867–893. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00185-8](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8)
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi Kelima). Salemba Empat.
- Halim, A. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Revisi). UPP

## AMP YKPN.

- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Haughton, J., & Khandker, S. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. World Bank.
- Hendratno, E. (2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Graha Ilmu.
- Himannudin, F., Marselina, M., Ratih, A., & Murwiati, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto di Asia Tenggara. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.26905/jrei.v3i2.8452>
- Irawan, B. B. (2007). 312-1184-1-Sm. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar, K., Piao, S., & Schauer, J. (2019). Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. *Journal of Banking and Financial Economics*, 2(2019), 5–28. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2019.2.1>
- Karlström, K. (2015). *Decentralization, corruption and the role of democracy*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah., (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE UNIBRAW.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Konsep dan Pedoman Umum Good Governance*. KNKG.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Kusuma, A. M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2005-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers STIE AAS*, 3(1), 233–250.
- Leasiwal, T. (2022). *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi*. Mitra Cendekia Media.

- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, G. (2008). *Ekonomi Publik* (Edisi Ketiga). BPFE.
- Mankiw, N. (2006). *Teori Makroekonomi* (Edisi Keenam). Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). ANDI.
- Mulyadi, S. (2007). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. ESIS.
- Munir, D. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw Hill.
- Musgrave, R. (1969). Theories of Fiscal Federalism. *Public Finance= Finances Publiques*, 24(4), 521–536.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Obeng, S. K. (2021). Fiscal decentralization, democracy and government size: Disentangling the complexities. *Journal of International Development*, 33(6), 975–1004. <https://doi.org/10.1002/jid.3545>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Qiao, M., Ding, S., & Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. *European Journal of Political Economy*, 59(November 2018), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.04.002>
- Ramon Lubis, A. J., Parmadi, P., & Aminah, S. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 97–104. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v6i3.4059>
- Said, A. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, M., Sc, M., Pengertian, I., & Desentralisasi, K. (2002). SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,”* 1–25.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.

- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana.
- Syafiie, I. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Ketujuh). Erlangga.
- Todaro, M., & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi Kesembilan). Erlangga.
- Todaro, M., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- UNDP Indonesia. (2011). *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009*. Jakarta, Indonesia.
- Usman, M., Nisa, H., Afriliani, E., & Yuliawan, D. (2023). Pengaruh Belanja Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 360–367.  
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2698/1165>
- Wahyudi, H., & Astuti, N. D. (2022). Perbankan Umum Syariah Jangka Panjang Dan Pendek Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Error Correction Model). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 129–145.  
<https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1417>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Widjaja. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wooldridge, J. (2013). *Introductory Econometrics a Modern Approach* (Fifth Edition). Cengage Learning.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.